

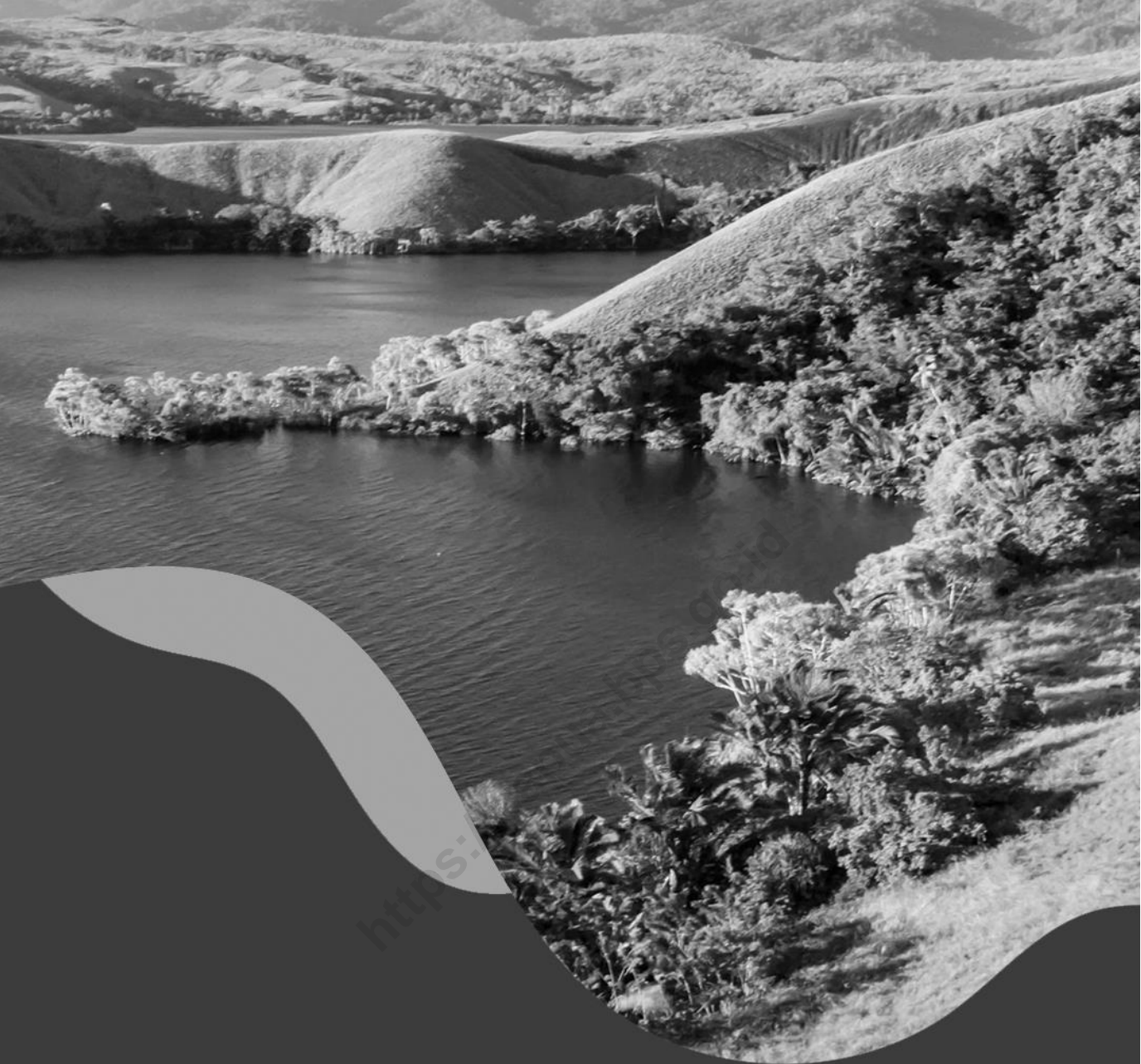


INDIKATOR **PENTING** PROVINSI PAPUA

Edisi Oktober 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA**



INDIKATOR PENTING PROVINSI PAPUA

Edisi Oktober 2021



©Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

INDIKATOR PENTING PROVINSI PAPUA
EDISI OKTOBER 2021

ISSN : 2477-4772
Katalog BPS : 1103009.94
No. Publikasi : 94000.2140

Naskah : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Editor : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Tata Letak : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Kover : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Dicetak Oleh : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Jayapura : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2021
xiv + 61 halaman; 18,2 cm x 25,7 cm (B5 JIS)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau meng-
gandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis
dari Badan Pusat Statistik.

INDIKATOR PENTING PROVINSI PAPUA

Edisi Oktober 2021

Pengarah	: Adriana Helena Carolina, SE., MM
Editor	: Priyo Yudyatmoko, S.ST, M.PP Lia Pujjalarasari, S.ST Deny Riani Maghfiroh, S.ST
Penulis	: Vierga Dea Margaretha Br. Sinaga, S.Si
Pengolahan Data	: Vierga Dea Margaretha Br. Sinaga, S.Si
Penyiapan Draft	: Vierga Dea Margaretha Br. Sinaga, S.Si

HEADLINE

NILAI TUKAR PETANI September 2021

NTP	102,04
NTUP	104,31
IKRT	0,00076%



DEFLASI September 2021

Gabungan 3 kota	0,41%
IHK	104,22



HEADLINE



ANGKUTAN LAUT Agustus 2021

Penumpang (org)	Barang (ton)
Berangkat 545	Bongkar 124.306
Datang 388	Muat 20.107

ANGKUTAN UDARA Agustus 2021

Penumpang (org)	Barang (ton)
Berangkat 36.014	Bongkar 1.434
Datang 43.866	Muat 10.758

EKSPOR IMPOR September 2021 (Juta US\$)

Ekspor	563,28
Impor	23,61
Neraca Perdagangan	539,67

PRAKATA

Indikator Penting Provinsi Papua ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua. Data dan informasi yang dimuat merupakan perkembangan data terbaru yang dihimpun dan dirilis BPS, yang merupakan hasil pendataan langsung dan hasil kompilasi produk administrasi pemerintah yang dilakukan secara teratur (bulanan, triwulanan dan tahunan) oleh jajaran BPS di seluruh Provinsi Papua.

Publikasi ini dimaksudkan untuk melengkapi bahan penyusunan kebijakan dan evaluasi kemajuan yang dicapai baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi. Indikator Penting Provinsi Papua ini mencakup antara lain: perkembangan bulanan Inflasi, Transportasi, Nilai Tukar Petani (NTP), Inflasi Pedesaan, Ekspor-Impor, Industri manufaktur, Pertumbuhan Ekonomi, Ketenagakerjaan, Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, IKK, IPM, IDI, serta Produksi Tanaman Pangan.

Data yang lebih luas dan spesifik untuk sektor tertentu, tersedia dalam publikasi BPS lainnya atau dapat diperoleh melalui website <http://papua.bps.go.id>. Semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh penggunanya.

Jayapura, Oktober 2021
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA,



Adriana Helena Carolina SE, M.M

DAFTAR ISI

PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xiii
SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	
Penduduk	3
Kemiskinan	6
Ketimpangan	9
Indeks Demokrasi Indonesia	10
Ketenagakerjaan	11
Indeks Pembangunan Manusia	13
Indeks Kebahagiaan	16
Potensi Desa (PODES)	18
EKONOMI DAN PERDAGANGAN	
Inflasi (<i>update</i>)	23
Produk Domestik Regional Bruto	25
Ekspor (<i>update</i>)	28
Impor (<i>update</i>)	30
Nilai Tukar Petani (<i>update</i>)	32
Angkutan Laut (<i>update</i>)	35
Angkutan Udara (<i>update</i>)	37
Industri Manufaktur	39
Pola Distribusi Perdagangan	41
PERTANIAN	
Tanaman Pangan	45
PENJELASAN TEKNIS	49
LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Garis Kemiskinan Menurut Daerah Provinsi Papua September 2013-Maret 2021 (rupiah)	8
Tabel 2. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Provinsi Papua	12
Tabel 3. Indeks Kebahagiaan dan Indeks Dimensi Menurut Karakteristik 2017	17
Tabel 4. Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan <i>Year on Year</i> Gabungan 3 Kota IHK di Papua	23
Tabel 5. IHK, Andil Inflasi, dan Inflasi <i>Year on Year</i> Gabungan 3 Kota IHK di Papua Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)	24
Tabel 6. Laju Pertumbuhan (q to q) dan (y-on-y) serta Distribusi PDRB dengan Pertambangan dan Penggalan Menurut Lapangan Usaha Triwulan II-2021	26
Tabel 7. Laju Pertumbuhan (q-to-q) dan (y-on-y) serta Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan II-2021 Provinsi Papua	27
Tabel 8. Ringkasan Perkembangan Ekspor Provinsi Papua Januari-September 2021	28
Tabel 9. Ringkasan Perkembangan Impor Provinsi Papua Januari-September 2021	30
Tabel 10. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian menurut subsektor Provinsi Papua dan Persentase Perubahannya, Agustus-September 2021 (2018=100)	34
Tabel 11. Perkembangan Penumpang Berangkat dan Datang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Agustus 2021	35
Tabel 12. Perkembangan Bongkar dan Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Agustus 2021	36
Tabel 13. Perkembangan Bongkar dan Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Agustus 2021	37
Tabel 14. Perkembangan Bongkar dan Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Agustus 2021	38
Tabel 15. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Menurut KBLI Provinsi Papua Triwulan IV-2019 (persen)	40
Tabel 16. Pola Utama Distribusi Perdagangan di Papua Tahun 2019	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Penduduk Provinsi Papua, 1980-2020	3
Gambar 2. Komposisi Penduduk menurut Generasi, 2020	4
Gambar 3. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua 2020 (orang)	5
Gambar 4. Piramida Penduduk Provinsi Papua 2020 (orang)	5
Gambar 5. Penduduk Miskin Provinsi Papua September 2013–Maret 2021	7
Gambar 6. Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Provinsi Papua September 2013-Maret 2021 (rupiah)	8
Gambar 7. Indeks Demokrasi Provinsi Papua, 2010-2020	10
Gambar 8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Papua, 2018-2020	12
Gambar 9. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional dan Papua Tahun 2010–2020	14
Gambar 10. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua, 2020	15
Gambar 11. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan UPT/SPT Hasil PODES Provinsi Papua Tahun 2011, 2014 dan 2018	19
Gambar 12. Perkembangan Sarana Sektor Ekonomi Provinsi Papua, 2014 dan 2018	19
Gambar 13. Perkembangan Sarana Sektor Pendidikan Provinsi Papua, 2014 dan 2018	19
Gambar 14. Pertumbuhan Ekonomi y-on-y Provinsi Papua, Triwulan II-2018 – Triwulan II-2021	26
Gambar 15. Nilai Ekspor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan, Januari-September 2020/2021* (Juta US\$)	29
Gambar 16. Nilai Impor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan, Januari-September 2021*	31
Gambar 17. Perkembangan NTP Papua Menurut Subsektor Agustus-September 2021(2018=100)	32
Gambar 18. Perkembangan Indeks Konsumsi Rumah Tangga Menurut Subkelompok Pengeluaran Provinsi Papua, Agustus-September 2020/2021 (2018=100)	33
Gambar 19. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Menurut KBLI Provinsi Papua Triwulan IV-2019 (persen)	39
Gambar 20. Produksi Beras Provinsi Papua Tahun 2019-2021 (Ton)	45

RINGKASAN EKSEKUTIF

Edisi Oktober 2021

1. Inflasi

- Pada bulan September 2021, tiga gabungan kota IHK di Papua (Kota Jayapura, Timika dan Merauke) mengalami deflasi 0,41 persen.
- Inflasi Kalender gabungan 3 kota IHK di Papua pada September 2021 sebesar -0,61 persen.
- Inflasi Year on Year (September 2021 terhadap September 2020) sebesar -0,40 persen.
- Seluruh Kota IHK di Papua mengalami deflasi seperti Kota Jayapura mengalami deflasi sebesar 0,35 persen, Merauke mengalami deflasi 0,75 persen dan Timika mengalami deflasi sebesar 0,30 persen.

2. Nilai Tukar Petani

- Nilai Tukar Petani (NTP) Papua pada September 2021 sebesar 102,04 atau mengalami penurunan sebesar 0,42 persen dibandingkan Agustus 2021.
- Komponen Pembentuk NTP yaitu Indeks Harga Diterima Petani (It) sebesar 107,04 dan Indeks Harga Dibayar Petani (Ib) sebesar 104,90.
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga Papua pada September 2021 sebesar 0,00076 persen atau menurun dibandingkan kondisi Agustus 2021.
- Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian Papua sebesar 104,31.

3. Transportasi

a. Transportasi Laut

- Jumlah penumpang yang berangkat pada Agustus 2021 dengan moda angkutan laut sebanyak 545 orang. Secara kumulatif, penumpang yang berangkat pada Januari-Agustus 2021 sebanyak 51.557 orang.
- Jumlah penumpang yang datang pada Agustus 2021 dengan moda transportasi angkutan laut sebanyak 388 orang. Secara kumulatif, penumpang yang datang pada Januari-Agustus 2021 sebanyak 64.192 orang.
- Volume barang yang dimuat pada Agustus 2021 sebanyak 20.107 ton.
- Volume barang yang dibongkar pada Agustus 2021 sebanyak 124.306 ton

b. Transportasi Udara

- Sejak bulan Februari 2021, BPS Provinsi Papua merilis data mengenai perkembangan transportasi udara.
- Data transportasi udara mencakup Bandara Sentani di Jayapura, Bandara Mopah di Merauke dan Bandara Mozes Kilangin di Mimika.
- Sehubungan dengan ditetapkannya sistem New Normal karena pandemic COVID-19 masih berlangsung, maka pemerintah menyusun regulasi yang mengatur moda transportasi udara selama masa pandemic seperti mengisi aplikasi e-hac, menunjukkan hasil tes PCR/rapid test.
- Jumlah penumpang yang berangkat pada Agustus 2021 dengan moda angkutan udara dalam negeri di tiga bandara sebanyak 36.014 orang.
- Jumlah penumpang yang datang pada Agustus 2021 dengan moda transportasi angkutan udara dalam negeri di 3 bandara sebanyak 43.866 orang.
- Volume barang yang dimuat pada Agustus 2021 sebanyak 10.758 ton.
- Volume barang yang dibongkar pada Agustus 2021 sebanyak 1.434 ton

4. Ekspor dan Impor

- Ekspor Papua pada September 2021 tercatat senilai US\$563,28 juta. Ekspor bulan ini hanya berupa ekspor non migas.
- Dilihat menurut ekspor golongan HS 2 digit, maka ekspor golongan Biji-bijian dan Konsentrat (HS26) menjadi primadona ekspor dari Papua dengan nilai ekspor mencapai US\$558,53 juta, meningkat 5,86 persen dari bulan sebelumnya.
- Total ekspor yang ditujukan ke enam negara tujuan utama (Spanyol, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, India dan Filipina) nilai ekspornya mencapai US\$369,70 juta sedangkan ekspor yang dilakukan ke negara lain tercatat sebesar US\$193,57 juta.
- Impor Papua pada September 2021 sebesar US\$23,61 juta berupa impor migas senilai US\$8,26 juta dan impor nonmigas US\$15,35 juta.
- Impor 10 golongan nonmigas utama pada September 2021 tercatat senilai US\$11,95 juta.
- Neraca Perdagangan Papua pada September 2021 mengalami surplus sebesar US\$539,67 juta. Kondisi surplus mengindikasikan bahwa nilai ekspor lebih besar dibandingkan nilai impornya.

<http://psipapua.bps.go.id>



SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

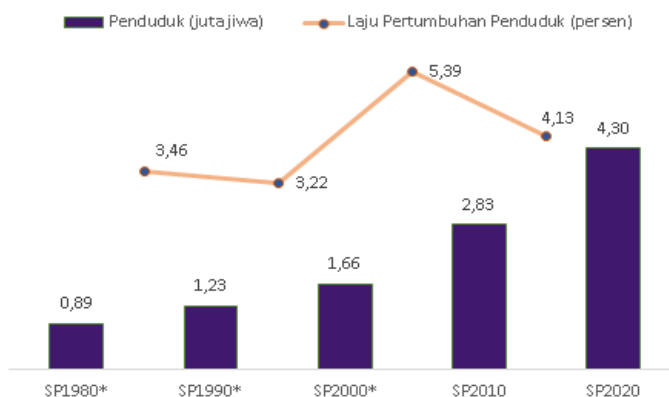
PENDUDUK

“Jumlah penduduk Papua September tahun 2020 mencapai 4,30 juta jiwa”

Sensus Penduduk 2020 (SP2020) merupakan sensus penduduk yang ketujuh sejak Indonesia merdeka. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, SP2020 menggunakan metode kombinasi yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020. Hal ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan “SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA”.

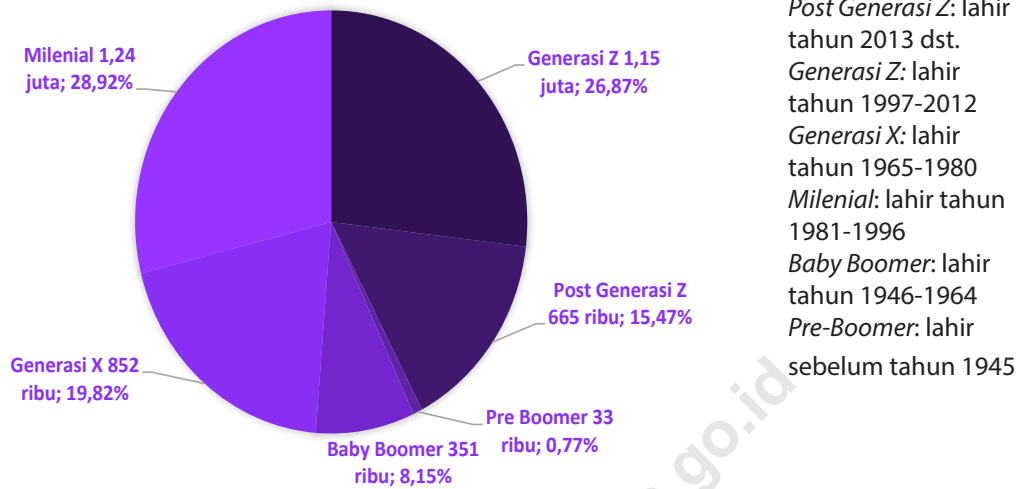
Secara khusus, tujuan SP2020 adalah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi dan karakteristik penduduk Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan berbagai upaya dan inovasi pada tata kelola SP2020, di antaranya menggunakan metode kombinasi dengan memanfaatkan basis data administrasi kependudukan, memanfaatkan perkembangan teknologi informasi pada kegiatan pengumpulan data, diantaranya melalui penggunaan *Computer Aided Web Interviewing* (CAWI) dalam Sensus Penduduk (SP) Online, memanfaatkan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) sebagai wilayah kerja statistik SP2020, menyesuaikan jangka waktu tinggal dalam konsep penduduk, dari minimal telah tinggal selama enam bulan menjadi minimal satu tahun, menggunakan pendekatan keluarga sebagai unit pendataan dan menyusun proses bisnis pengumpulan data yang

Gambar 1. Jumlah Penduduk Provinsi Papua, 1980-2020



* masih bergabung dengan Papua Barat

Gambar 2. Komposisi Penduduk menurut Generasi, 2020



komprensif

Adapun beberapa penyesuaian tata kelola terhadap pelaksanaan SP2020 diakibatkan dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi oleh WHO, maka SPOnline yang semula di laksanakan pada tanggal 15 Februari s.d. 31 Maret 2020, kemudian diperpanjang hingga 29 Mei 2020. Pendataan penduduk yang semula dilaksanakan pada Juli 2020 dimundurkan ke September 2020 dan Metode pendataan penduduk yang semula direncanakan secara wawancara dan wilayah dibagi menjadi 2 zona dengan mempertimbangkan ketersediaan akses internet, yaitu zona yang menggunakan kuesioner kertas (*paper and pencil interviewing*, PAPI) dan dan zona yang menggunakan elektronik (*computer assisted personal interviewing*, CAPI), akhirnya dibagi menjadi 3 zona, yaitu Zona 1 *Drop Off and Pick up* (DOPU) kuesioner PAPI, Zona 2 Non DOPU, dan Zona 3 Wawancara.

SP2020 mencatat penduduk Papua pada bulan September 2020 sebanyak 4,30 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Papua mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak 2010, jumlah penduduk Papua bertambah sekitar 1,47 juta jiwa dengan laju pertumbuhan (2010-2020) sebesar 4,13 persen pertahun.

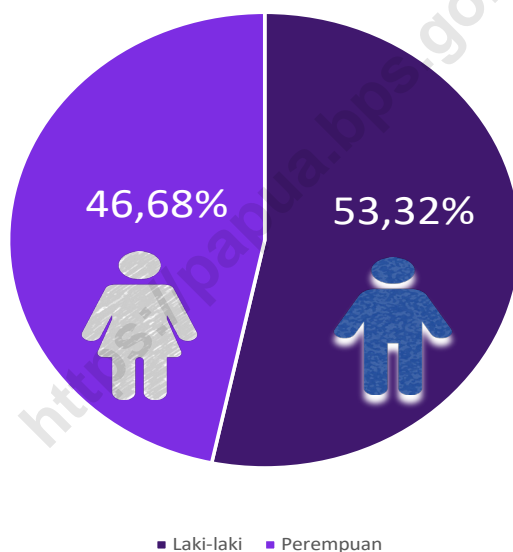
Berdasarkan kesesuaian alamat domisili dan Kartu Keluarga (KK)/ Kartu Tanda Penduduk (KTP), dari 4,30 juta jiwa sebesar 3,99 juta jiwa (92,83 persen) penduduk Papua berdomisili sesuai KK/KTP. Sementara sisanya sebesar 308 ribu jiwa (7,17 persen) adalah penduduk yang berdomisili

tidak sesuai KK/KTP.

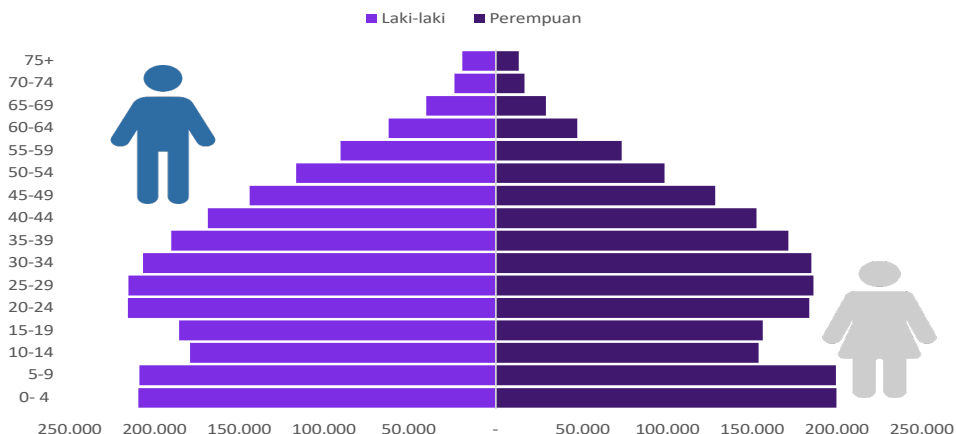
Dilihat dari penduduk menurut generasi, mayoritas penduduk Papua didominasi oleh Milenial dan Generasi Z dengan proporsi masing-masing sebesar 32,09 persen dan 30,38 persen.

SP2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Papua sebanyak 2,29 juta jiwa atau 53,32 persen dari total penduduk. Sementara penduduk perempuan sekitar 2 juta orang atau 46,68 persen dari total penduduk Papua. Maka, rasio jenis kelamin penduduk Papua sebesar 114, yang artinya terdapat 114 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Provinsi Papua pada tahun 2020.

Gambar 3. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua 2020 (persen)



Gambar 4. Piramida Penduduk Provinsi Papua 2020 (orang)



KEMISKINAN

“Persentase penduduk miskin Provinsi pada Maret 2021 sebesar 26,86 persen, naik 0,06 persen poin dibanding September 2020”

Secara umum, pada periode Maret 2012-Maret 2021 tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari sisi persentase. Persentase penduduk miskin pada periode tersebut turun sebesar 4,25 persen poin, yaitu dari 31,11 persen atau berjumlah 920,52 ribu jiwa pada Maret 2012 menjadi 26,86 persen atau 920,44 ribu jiwa pada Maret 2021.

Menurut tipe daerahnya, penduduk miskin terkonsentrasi di daerah perdesaan, dimana pada Maret 2021 terdapat 872,08 ribu jiwa atau 35,71 persen penduduk miskin tinggal di perdesaan, sedangkan di perkotaan hanya sebesar 48,36 ribu jiwa atau 4,91 persen.

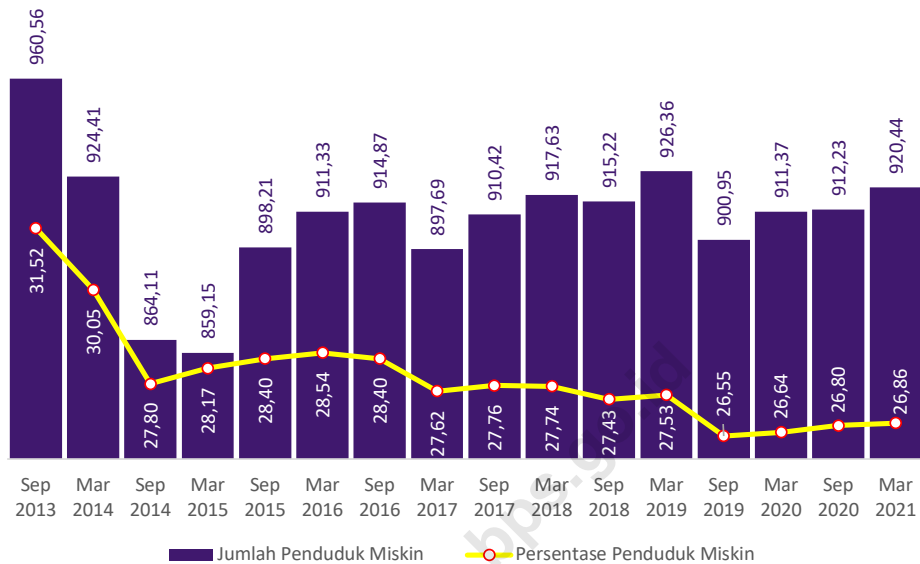
Jika dibandingkan dengan kondisi pada periode sebelumnya (September 2020), terdapat peningkatan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 0,32 persen poin. Sejalan dengan daerah perdesaan persentase penduduk miskin naik sebesar 0,02 persen poin.

Pada Maret 2021, persentase penduduk miskin di 3 (tiga) provinsi di Kawasan Timur Indonesia yaitu Provinsi Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin terbesar yaitu secara berurutan 26,86 persen, 21,84 persen dan 20,99 persen. Sedangkan 3 (tiga) provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah berada di Provinsi Bali sebesar 4,53 persen, diikuti oleh DKI Jakarta 4,72 persen dan Kalimantan Selatan sebesar 4,83 persen.

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Seiring dengan kenaikan harga (inflasi) yang terjadi dari tahun ke tahun, besarnya GK juga mengalami peningkatan. Garis kemiskinan di Provinsi Papua Maret 2021 adalah Rp591.959,-. Selama September 2020-Maret 2021 terjadi kenaikan GK, yaitu Rp11.496,- atau sebesar 1,98 persen.

Menurut tipe daerahnya, GK daerah perkotaan pada Maret 2021 adalah

Gambar 5. Penduduk Miskin Provinsi Papua September 2013–Maret 2021



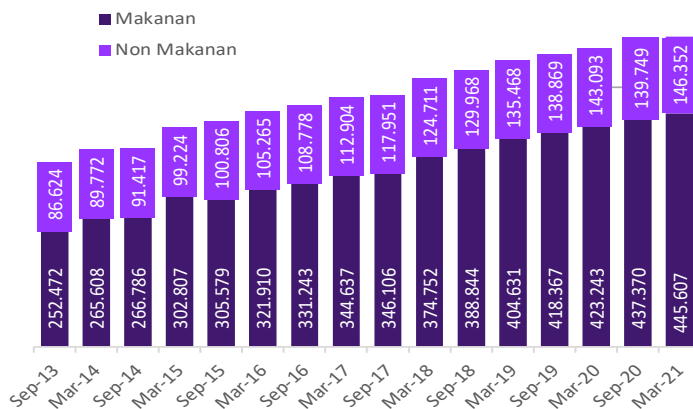
sebesar Rp634.703,-. Nilai ini lebih tinggi dibanding GK perdesaan yang sebesar Rp573.510,-. Hal ini berarti biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal yang layak (*basic needs*) untuk makanan dan bukan makanan lebih besar di perkotaan daripada di perdesaan.

Jika dilihat pada periode September 2020–Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Papua menunjukkan kecenderungan turun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 6,902 pada September 2020 menjadi 5,601 pada Maret 2021. Demikian pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 2,350 menjadi 1,689 pada periode yang sama. Kenaikan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan antar penduduk miskin semakin bertambah dibanding periode sebelumnya.

**Tabel 1. Garis Kemiskinan Menurut Daerah Provinsi Papua
September 2013-Maret 2021 (rupiah)**

Periode	Garis Kemiskinan (Per Kapita Per Bulan)		
	Kota	Desa	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)
Sep-13	387 789	322 079	339 096
Mar-14	404 944	338 206	355 380
Sep-14	408 419	340 846	358 204
Mar-15	440 697	388 095	402 031
Sep-15	445 057	392 446	406 385
Mar-16	466 985	412 991	427 176
Sep-16	479 294	425 264	440 021
Mar-17	498 368	441 287	457 541
Sep-17	508 403	446 994	464 056
Mar-18	542 542	482 000	499 643
Sep-18	566 903	499 615	518 811
Mar-19	588 744	520 117	540 099
Sep-19	603 458	538 088	557 236
Mar-20	611 115	542 695	562 992
Sep-20	622 346	562 412	580 463
Mar-21	634 703	573 510	591 959

**Gambar 6. Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Provinsi
Papua September 2013-Maret 2021 (rupiah)**



KETIMPANGAN

“Gini Ratio Maret 2021 tercatat sebesar 0,397”

Pada Maret 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Papua yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,397. Angka ini meningkat sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* September 2020 yang sebesar 0,395.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,301 turun 0,010 poin dibanding *Gini Ratio* September 2020 yang sebesar 0,291, dan naik 0,005 poin jika dibanding *Gini Ratio* Maret 2020 yang sebesar 0,296. Sementara itu, *Gini Ratio* di daerah perdesaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,422, naik 0,006 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* September 2020 yang sebesar 0,416 dan juga naik 0,008 poin dibanding *Gini Ratio* Maret 2020 sebesar 0,414.

Pada Maret 2021, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 15,74 persen. Artinya pengeluaran penduduk berada pada kategori tingkat ketimpangan sedang. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 21,65 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 15,32 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan sedang.

Gini Ratio jika dilihat menurut provinsi, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai nilai *Gini Ratio* tertinggi yaitu sebesar 0,441, sementara provinsi dengan *Gini Ratio* terendah tercatat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,256. Dibanding dengan *Gini Ratio* nasional yang sebesar 0,384 terdapat 6 (enam) provinsi dengan angka *Gini Ratio* lebih tinggi, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,441), Jawa Barat (0,412), DKI Jakarta (0,406), Gorontalo (0,408), Papua (0,397), dan Sulawesi Tenggara (0,390). Provinsi Papua baik pada periode September 2020 maupun Maret 2021, termasuk salah satu provinsi yang memiliki angka *Gini Ratio* lebih tinggi dari *Gini Ratio* nasional.

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

“IDI Provinsi Papua 2020 mencapai angka 64,54 yang berarti bahwa capaian kinerja demokrasi Indonesia pada kategori sedang”

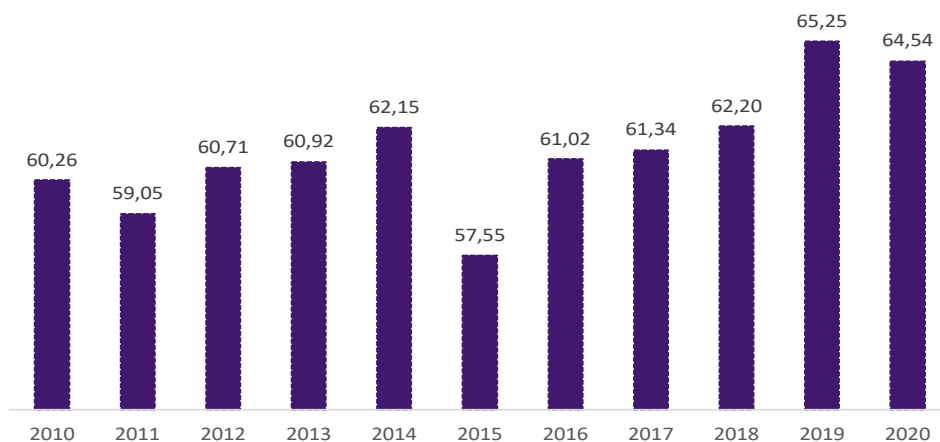
Aspek demokrasi yang dihitung dalam penyusunan IDI adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data diantaranya, *review* surat kabar lokal, *review* dokumen (Perda, Pergub,dll), *Focus Grup Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam.

IDI Provinsi Papua tahun 2020 adalah 64,54 turun 0,71 poin dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 65,25. Kondisi ini menempatkan kinerja demokrasi Papua masih berada pada kategori ‘sedang’.

IDI dari 2019–2020, aspek Kebebasan Sipil merupakan satu-satunya yang mengalami penurunan sebesar 3,76 poin (dari 93,08 menjadi 89,32), sedangkan aspek Hak-hak Politik meningkat sebesar 0,67 poin (dari 51,16 menjadi 51,83) dan aspek Lembaga Demokrasi juga meningkat sebesar 0,93 poin (dari 52,61 menjadi 53,54).

Gambar 7. Indeks Demokrasi Provinsi Papua, 2010-2020



KETENAGAKERJAAN

“Februari 2021, TPAK Papua sebesar 73,47 persen dan TPT sebesar 3,77 persen”

Penduduk usia kerja di Papua berjumlah 2.494.062 orang pada Februari 2021, naik hampir 45 ribu orang dibandingkan Agustus 2020 sebesar 2.449.145 orang.

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK penduduk laki-laki pada Februari 2021 lebih tinggi dibandingkan perempuan. Terjadi perbedaan tren antara keduanya dimana TPAK laki-laki naik sebesar 3,74 persen ke angka 83,58, sedangkan TPAK perempuan kembali turun sebesar 1,41 persen ke angka 62,06.

Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Papua pada Februari 2021 sebanyak 1.763.180 orang, meningkat sekitar 71 ribu orang dibandingkan Agustus 2020.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Papua pada Februari 2021 sebesar 3,77 persen, turun 0,51 persen dibandingkan kondisi Agustus 2020. TPT Papua juga lebih rendah dari TPT Indonesia yang berada di angka 6,27 persen.

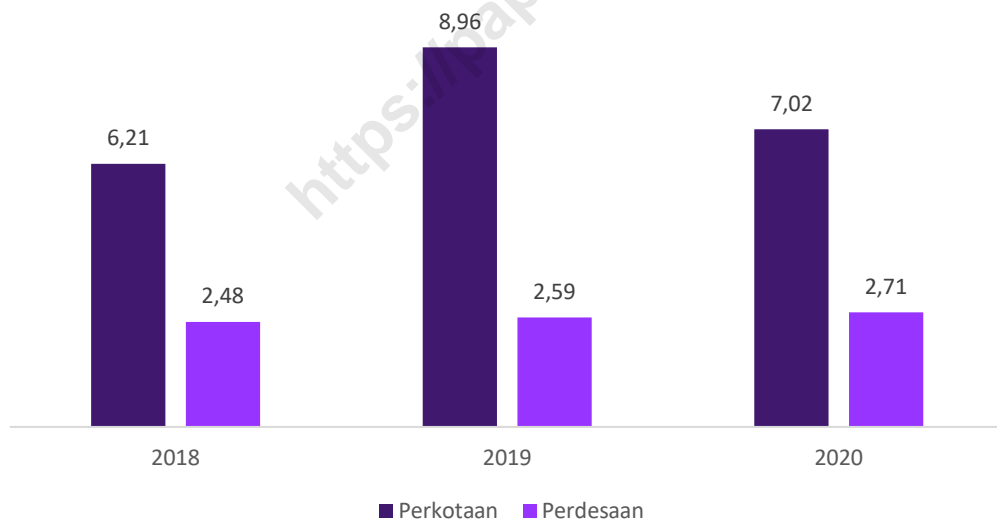
Pengangguran di perdesaan sedikit mengalami peningkatan sebesar 0,12 persen, sedangkan di perkotaan menurun cukup signifikan dari 8,96 persen pada Agustus 2020 menjadi 7,02 persen.

Sudah setahun lebih sejak Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO pada 16 Maret 2020. Sejak saat itu, berbagai daerah di Indonesia menerapkan pembatasan sosial, tidak terkecuali di Provinsi Papua. Pandemi ini tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan, namun juga sektor perekonomian yang menurun setelah adanya pembatasan. Penurunan tersebut berdampak juga pada dinamika ketenagakerjaan. Pada Februari 2021, ada sekitar 118.201 orang atau 4,74 persen dari total penduduk usia kerja yang merasakan dampak pandemi Covid-19 di Papua. Angka tersebut sudah turun hampir 50 persen dari kondisi Agustus 2020 yang mencapai 229.617 orang atau sebanyak 9,38 persen dari total penduduk usia kerja.

Tabel 2. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Provinsi Papua

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2020	Agustus 2020	Februari 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk Usia Kerja	2.449.941	2.449.145	2.494.062
Angkatan Kerja	1.837.805	1.767.403	1.832.278
Bekerja	1.774.917	1.692.745	1.763.180
Penganggur	62.888	76.658	69.098
Bukan Angkatan Kerja	612.136	681.742	661.784
TPAK (%)	75,01	72,16	73,47
Laki-laki	84,94	79,84	83,58
Perempuan	63,77	63,47	62,06

Gambar 8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Klasifikasi Wilayah



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

“IPM Provinsi Papua tahun 2020 sebesar 60,44 dan status pembangunan berada di kategori sedang”

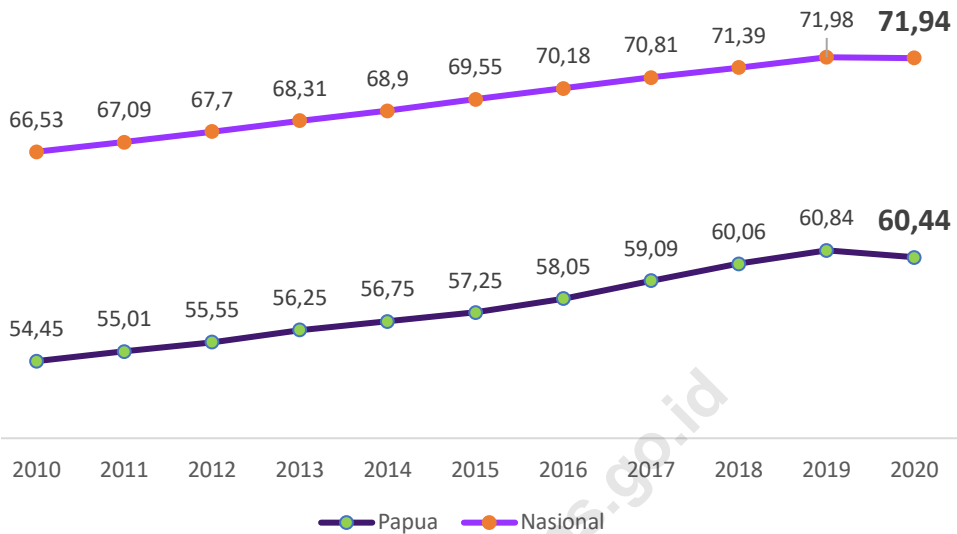
Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people's choice*). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan antara lain dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); pengetahuan (*knowledge*); dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan dengan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Dimensi pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Dimana Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, dan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sementara itu, standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Secara umum, pembangunan manusia Papua terus mengalami

Gambar 9. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional dan Papua Tahun 2010 – 2020



kemajuan selama periode 2010 hingga 2019, akan tetapi pada tahun 2020 IPM Papua menurun dari 60,84 pada tahun 2019 menjadi 60,44 pada tahun 2020. Pertumbuhan pada periode 2019-2020 turun sebesar -0,66 persen.

Pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota di Papua pada tahun 2020 masih belum merata. Dari 29 kabupaten/kota ada 13 kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPM, sisanya 16 kabupaten/kota mampu tumbuh atau stabil. Penurunan ini menyebabkan status IPM Kota Jayapura yang pada periode lalu berada pada status "Sangat Tinggi" kini harus turun ke status "Tinggi". Sementara pada periode ini, Kabupaten Merauke justru meningkat statusnya dari "Sedang" ke "Tinggi".

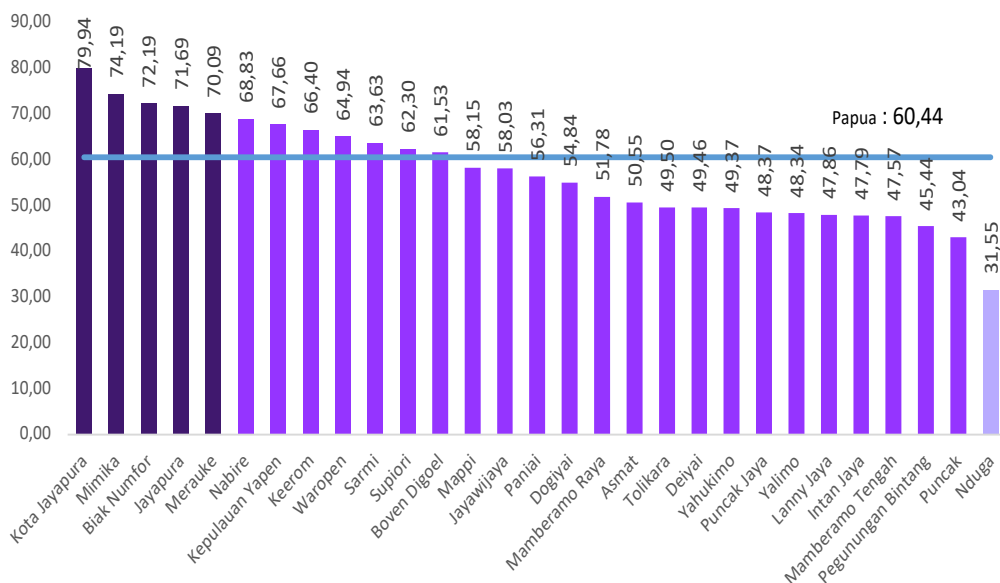
Ada 5 kabupaten/kota dengan status IPM "Tinggi" yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, Mimika dan Merauke. Untuk kabupaten/kota dengan status IPM "Sedang" ada sebanyak 7 kabupaten yaitu Nabire, Kepulauan Yapen, Sarmi, Keerom, Waropen, Supiori dan Boven Digoel. Sementara itu, sebagian besar kabupaten status "Rendah" sebanyak 17 kabupaten yaitu Jayawijaya, Paniai, Puncak Jaya, Mappi, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Nduga Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai dan Mamberamo Raya.

Kabupaten Nduga merupakan kabupaten dengan IPM terendah di Papua hanya sebesar 31,55. Sedangkan Kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi

Papua tercatat memiliki pembangunan manusia tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Papua. Pada tahun 2020, IPM Kota Jayapura mencapai 79,94. Penurunan ini (-0,27 persen) disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19, sehingga berdampak pada menurunnya komponen pengeluaran per kapita di Kota Jayapura sebesar 413 ribu

Selama periode 2019-2020, hanya ada 15 kabupaten yang mengalami kenaikan IPM, 1 kabupaten tetap, sementara 13 kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan. Kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat yaitu: Kabupaten Nduga (2,60 persen), Puncak (0,80 persen), dan Mamberamo Tengah (0,72 persen). Kemajuan pembangunan manusia di ketiga kabupaten tersebut didorong oleh peningkatan dimensi pendidikan. Sedangkan kabupaten/kota yang mengalami penurunan paling dalam yaitu Deiyai (-1,30 persen), Dogiyai (-1,03 persen) dan Mamberamo Raya (-0,80 persen). Secara nasional, peningkatan IPM tercermin pada level provinsi. Selama periode 2019 hingga 2020, 10 provinsi mengalami penurunan IPM, sedangkan lainnya masih mampu tumbuh. Provinsi dengan kemajuan pembangunan paling cepat yaitu: Provinsi Papua Barat (0,60 persen), Sulawesi Barat (0,58 persen), Sulawesi Selatan (0,38 persen). Sementara, provinsi yang mengalami penurunan paling dalam yakni: Kalimantan Utara (-0,73 persen), Papua (-0,66 persen) dan Kalimantan Timur (-0,48 persen).

Gambar 10. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua, 2020



INDEKS KEBAHAGIAAN

“Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua tahun 2017 sebesar 67,52”

Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua merupakan indeks komposit yang dihitung secara tertimbang menggunakan dimensi dan indikator dengan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka semakin merasa tidak bahagia.

Metode pengukuran Indeks Kebahagiaan tahun 2017 mengalami perubahan dari pengukuran sebelumnya pada tahun 2014 karena adanya penambahan cakupan indeks. Pada tahun 2014, Indeks Kebahagiaan hanya menggunakan Dimensi Kepuasan Hidup. Sedangkan pada tahun 2017, dalam indeks kebahagiaan ditambahkan Dimensi Perasaan (Affect) dan Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia). Perubahan lainnya yaitu pada tahun 2017, Dimensi Kepuasan Hidup terbagi menjadi 2 (dua) subdimensi yaitu Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial.

Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua tahun 2017 yang dihitung dengan menggunakan Metode 2014, lebih tinggi dibanding tahun 2014. Pada tahun 2017 sebesar 67,52 sedangkan pada tahun 2014 sebesar 60,97.

Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua tahun 2017 sebesar 67,52. Besarnya indeks masing-masing dimensi penyusun Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua, yaitu: (1) Indeks Dimensi Kepuasan Hidup sebesar 68,42, dengan masing-masing Subdimensi Kepuasan Hidup Personal sebesar 63,04 dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial sebesar 73,80; (2) Indeks Dimensi Perasaan (Affect) sebesar 68,42; dan (3) Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia) sebesar 69,98. Seluruh indeks diukur pada skala 0-100.

Berdasarkan indikator penyusunnya, indeks indikator tertinggi adalah Kepuasan terhadap Kondisi Keamanan yaitu sebesar 75,79 yang merupakan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial. Sementara indeks indikator terendah adalah Pendidikan dan Keterampilan 53,54 yang merupakan Subdimensi Kepuasan Hidup Personal.

Tabel 3. Indeks Kebahagiaan dan Indeks Dimensi Menurut Karakteristik 2017

Karakteristik	Indeks Kebahagiaan	Penyusun Indeks Kebahagiaan				
		Indeks Dimensi Kepuasan Hidup			Indeks Dimensi Perasaan (Affect)	Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia)
		Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup		Total		
(1)	(2)	Personal	Sosial	(5)	(6)	(7)
Klasifikasi Wilayah						
Perkotaan	73,51	71,86	78,09	74,97	68,03	77,02
Perdesaan	65,29	59,77	72,21	65,99	62,25	67,37
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	66,67	61,86	73,17	67,51	63,13	69,06
Perempuan	70,36	67,04	75,92	71,48	66,13	73,10
Status Perkawinan						
Belum Menikah	69,04	65,68	73,39	69,54	65,26	72,00
Menikah	67,51	63,15	73,87	68,51	63,77	69,93
Cerai Hidup	66,22	62,65	75,25	68,95	57,60	71,33
Cerai Mati	67,37	61,08	72,86	66,97	65,15	69,82
Kelompok Umur						
≤ 24 Tahun	67,22	62,63	74,02	68,32	61,41	71,41
25-40 Tahun	67,06	62,60	73,03	67,82	63,49	69,55
41-64 Tahun	68,03	63,54	74,66	69,10	64,37	70,29
≥ 65 Tahun	67,61	63,13	72,82	67,97	62,86	71,58
Kedudukan Dalam Rumah Tangga:						
Kepala Rumah Tangga	66,77	61,84	73,23	67,53	63,23	69,24
Pasangan KRT	71,86	70,06	77,14	73,60	67,23	74,31
Banyaknya Anggota Rumah Tangga:						
1 Orang	67,42	63,14	70,61	66,88	66,01	69,27
2 Orang	66,99	62,11	72,03	67,07	64,87	68,86
3 Orang	66,13	62,76	72,95	67,85	61,46	68,65
4 Orang	67,40	63,11	73,95	68,53	63,32	69,97
5 Orang atau Lebih	68,83	63,56	75,43	69,49	65,16	71,50
Pendidikan Tertinggi						
Tidak pernah sekolah	63,49	56,63	70,98	63,80	61,68	64,83
Tidak tamat SD/ sederajat	65,95	62,55	73,93	68,24	60,15	68,93
SD sederajat	65,54	60,08	73,97	67,03	60,99	68,19
SMP sederajat	69,72	65,12	74,03	69,57	67,18	72,20
SMA sederajat	71,03	69,29	76,20	72,75	65,49	74,36
Diploma I, II, III	73,48	73,83	76,22	75,02	68,37	76,59
Diploma IV/S1	75,16	73,86	77,50	75,68	70,55	78,84
S2, S3	76,48	76,94	73,83	75,38	73,11	80,68
Pendapatan Rata						
Hingga Rp 1.800.000	62,39	56,29	70,23	63,26	58,03	65,50
Rp 1.800.001 - Rp 3.000.000	67,41	61,62	73,63	67,63	65,02	69,37
Rp 3.000.001 - Rp 4.800.000	70,56	68,19	77,31	72,75	65,30	73,13
Rp 4.800.001 - Rp 7.200.000	74,78	74,60	78,29	76,44	70,37	77,12
Lebih Dari Rp. 7.200.000	75,25	75,54	77,34	76,44	71,32	77,62
Papua	67,52	63,04	73,80	73,80	68,42	69,98

POTENSI DESA (PODES)

“Tahun 2018, di Provinsi Papua terdapat 5.456 desa, 96 kelurahan, 576 kecamatan, dan 29 kabupaten/kota”

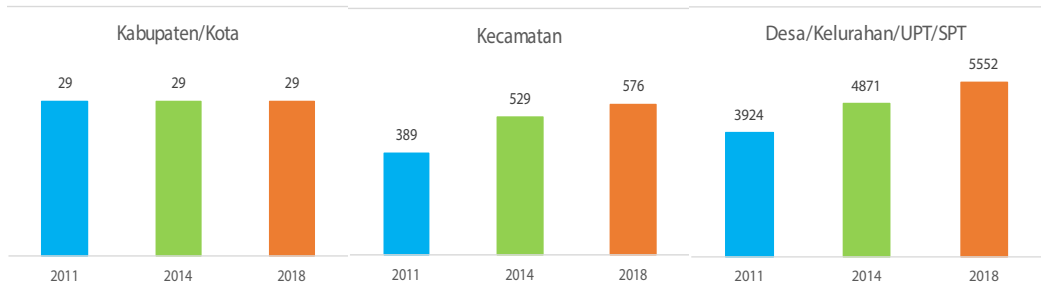
Podes 2018 dilaksanakan pada Mei 2018 secara sensus terhadap seluruh Desa/ Kelurahan/Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT), Kecamatan, Kabupaten/Kota. Wilayah tersebut harus memenuhi tiga (3) syarat, yaitu: 1) ada wilayah 2) ada penduduk, dan 3) ada pemerintahan desa. Menurut Podes 2018, di Provinsi Papua terdapat 5.552 wilayah setingkat desa, 576 kecamatan, 29 kabupaten/kota. Dari sejumlah desa tersebut, terdiri atas 5.456 desa dan 96 kelurahan.

Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Indeks Pembangunan Desa terdiri dari lima (5) dimensi yaitu 1) Pelayanan Dasar, 2) Kondisi Infrastruktur, 3) Aksesibilitas/Transportasi, 4) Pelayanan Umum, dan 5) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Tingkat perkembangan desa menurut IPD dikategorikan kedalam tiga (3) status yaitu: Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal. Semakin tinggi IPD menunjukkan semakin mandiri desa tersebut. Jumlah desa mandiri di Provinsi Papua sebanyak 10 desa (0,18 persen), 693 desa berkembang (12,70 persen), dan 4.753 desa tertinggal (87,12 persen). Rata-rata IPD Provinsi Papua untuk Dimensi Transportasi 56,96; Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 52,30; Dimensi Pelayanan Umum 41,67 persen; Dimensi Pelayanan Dasar 25,05; dan Dimensi Kondisi Infrastruktur 18,49.

Pendataan Podes 2018 mengumpulkan beragam informasi. Salah satu potensi desa/kelurahan yang disajikan terkait bidang pariwisata yaitu potensi wisata di desa/kelurahan. Podes 2018 mencatat ada 40 desa wisata di Provinsi Papua, meningkat dari tahun 2014 yang hanya 17 desa wisata. Pada bidang ekonomi, peningkatan terjadi pada desa/kelurahan yang memiliki Industri Kecil dan Mikro. Peningkatan terbesar terjadi

Gambar 11. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan UPT/SPT Hasil PODES Provinsi Papua Tahun 2011, 2014 dan 2018

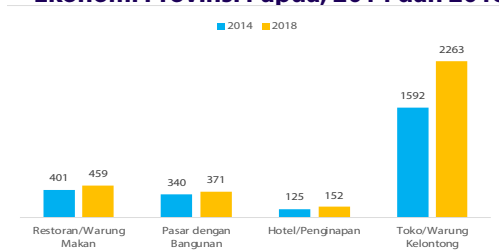


pada Industri Makanan dan Minuman sebesar 77 persen (menjadi 244 desa/kelurahan). Pada sarana ekonomi lainnya juga terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2014. Desa/kelurahan dengan keberadaan warung/toko kelontong, pasar dengan bangunan (permanen dan semi permanen), hotel/penginapan, toko/warung kelontong.

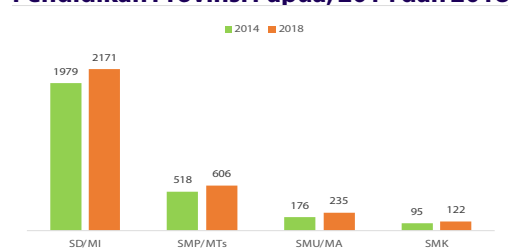
Pada bidang kesehatan, desa dengan penyelenggaraan kegiatan posyandu sebulan sekali meningkat 18 persen dibandingkan tahun 2014 menjadi 2.012 desa/kelurahan. Desa/kelurahan dengan keberadaan puskesmas dan puskesmas pembantu masing-masing meningkat 9 persen (menjadi 422 desa/kelurahan) dan 17 persen (menjadi 1.146 desa/kelurahan). Pada bidang perumahan dan lingkungan hidup ada beberapa peningkatan dibandingkan tahun 2014. Desa dengan/kelurahan dengan keberadaan pengguna listrik meningkat 39 persen (menjadi 4.050 desa/kelurahan). Desa/kelurahan dengan keberadaan pengguna sumber air bersih untuk minum meningkat 12 persen (menjadi 3.906 desa/kelurahan). Desa/kelurahan dengan keberadaan pengguna jamban sebagai fasilitas buang air besar meningkat sebesar 44 persen (menjadi 3.020 desa/kelurahan).

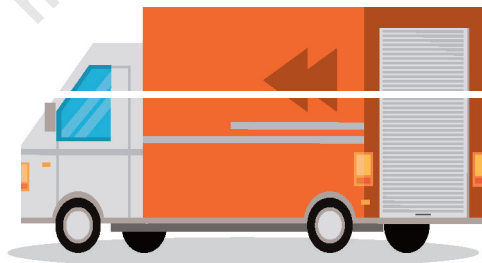
Pada bidang pendidikan, desa dengan keberadaan SD/MI sampai dengan SMU/MA dan SMK mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada keberadaan SMU/MA. Dari segi pendidikan kepala desa/lurah, ada 1.817 kepala desa/lurah berpendidikan minimal SMU/ sederajat (meningkat 33 persen dibandingkan tahun 2014).

Gambar 12. Perkembangan Sarana Sektor Ekonomi Provinsi Papua, 2014 dan 2018



Gambar 13. Perkembangan Sarana Sektor Pendidikan Provinsi Papua, 2014 dan 2018





EKONOMI DAN PERDAGANGAN

INFLASI

"September 2021, Deflasi Papua sebesar 0,41 persen"

Pada Bulan September 2021 gabungan 3 kota IHK dengan menggunakan penghitungan tahun dasar baru tahun 2018, tercatat mengalami deflasi sebesar 0,41 persen atau terjadi penurunan angka Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,64 pada Agustus 2021 menjadi 104,22 pada September 2021. Laju Inflasi gabungan 3 kota IHK di Papua tahun kalender (September 2021 terhadap Desember 2020) mencapai -0,61 persen dan laju inflasi *y-o-y* (September 2021 terhadap September 2020) mencapai -0,40 persen.

Deflasi gabungan 3 kota IHK di Papua pada September 2021 terjadi karena adanya penurunan angka indeks pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,32 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,03 persen; dan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,01 persen. .

Faktor pendorong terjadinya deflasi adalah penurunan harga pada beberapa komoditas antara lain: cabai rawit, ikan ekor kuning, tomat, kangkung, dan ikan cakalang/ikan sisik. Adapun komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain: buah pinang, ikan kembung, daging ras ayam, tarif angkutan udara dan ikan kawalina.

Besaran andil masing-masing kelompok komoditi terhadap perkembangan deflasi bulan September 2021 di Papua (gabungan 3 kota IHK) adalah

Tabel. 4 Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan *Year on Year* Gabungan 3 Kota IHK di Papua

No	Inflasi	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	2021 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	September (t) terhadap Agustus (t)	-1,19	-0,22	-0,41
2	September (t) terhadap Desember (t-1) (Tahun Kalender)	-1,08	1,42	-0,61
3	September (t) terhadap September (t-1) (<i>Year on Year</i>)	1,90	1,93	-0,40

1) Metode agregasi *constant weighting* menggunakan 2 kota IHK dan tahun dasar 2012 (2012=100)

2) Metode agregasi *dynamic weighting* menggunakan 3 kota IHK dan tahun dasar 2018 (2018=100)

sebagai berikut: kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen; kelompok transportasi sebesar 0,04 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,0004 persen; kelompok rekreasi dan olahraga dan budaya sebesar 0,001 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,004 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 0,002 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,02 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi antara lain : kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar -0,49 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar -0,001 persen; dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar -0,0004 persen.

Tabel 5. IHK, Andil Inflasi, dan Inflasi Year on Year Gabungan 3 Kota IHK di Papua Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

No	Kelompok	IHK September 2021	Inflasi September 2021 ⁽¹⁾	Andil Inflasi	Inflasi Year-on-Year ⁽²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Umum	104,22	-0,41	-0,41	-0,40
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	105,41	-1,32	-0,49	0,07
2	Pakaian dan Alas Kaki	102,61	-0,03	-0,001	1,82
3	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	100,40	0,03	0,005	0,35
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	104,04	-0,01	-0,0004	1,15
5	Kesehatan	108,09	0,52	0,01	2,08
6	Transportasi	105,52	0,32	0,04	-5,99
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	101,39	0,01	0,0004	0,91
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	104,94	0,09	0,001	0,88
9	Pendidikan	105,20	0,11	0,004	-0,06
10	Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran	105,21	0,03	0,002	1,34
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	107,67	0,40	0,02	-1,15

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

“Ekonomi Papua triwulan II-2021 tumbuh 13,14 persen”

Pada triwulan II-2021, besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 56,18 triliun dan atas harga konstan 2010 mencapai Rp. 37,60 triliun.

A. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Ekonomi Papua selama triwulan II-2021, jika dibandingkan dengan triwulan II-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 13,14 persen. Hal ini disebabkan karena tingginya pertumbuhan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar, yaitu Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh hingga 34,44 persen. Pertumbuhan ini terjadi karena besarnya peningkatan produksi emas dan tembaga PT Freeport Indonesia pada triwulan ini dibandingkan triwulan II-2020. Selain Pertambangan dan Penggalian, terdapat tiga belas lapangan usaha lain yang juga mengalami pertumbuhan positif pada triwulan II-2021 ini.

Selama triwulan II-2021, kategori yang memberikan kontribusi tertinggi dalam ekonomi Papua adalah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 35,61 persen; diikuti Konstruksi sebesar 14,07 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,49 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,10 persen; Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,55 persen.

Pertumbuhan ekonomi Papua selama triwulan II-2021 secara q-to-q mengalami pertumbuhan sebesar 2,06 persen. Pertumbuhan ekonomi Papua pada triwulan ini disebabkan karena sebagian besar kenaikan lapangan usaha mengalami kenaikan pertumbuhan (11 dari 17 lapangan usaha). Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi pada triwulan II-2021, beberapa diantaranya karena peningkatan produksi biji logam PT Freeport dan adanya perayaan hari besar keagamaan pada bulan Mei.

Tabel 6. Laju Pertumbuhan (q to q) dan (y-on-y) serta Distribusi PDRB dengan Pertambahan dan Penggalan Menurut Lapangan Usaha Triwulan II-2021 (persen)

No	Kategori	Laju Pertumbuhan (q-to-q)	Laju Pertumbuhan (y-on-y)	Distribusi ADHB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,31	3,89	11,49
2	Pertambangan dan Penggalan	1,00	34,44	35,61
3	Industri Pengolahan	0,95	-1,72	1,89
4	Konstruksi	5,20	1,86	14,07
5	Perdagangan Besar dan Eceran ; Rep- arasi Mobil dan Sepeda Motor	5,04	6,49	9,55
6	Transportasi dan Pergudangan	-1,90	14,82	3,15
7	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,09	2,64	10,10
8	Lainnya	-2,56	-2,49	14,14
	Total	2,06	13,14	100,00

Di sisi lain masih terdapat enam lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan. Kontraksi terdalam adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar -7,88 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh putusnya kabel serta optik PT Telkom yang menyebabkan lumpuhnya jaringan internet di beberapa wilayah di Papua.

B. PDRB Menurut Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Papua triwulan II-2021

Gambar 14. Pertumbuhan Ekonomi y-on-y Provinsi Papua, Triwulan II-2018 – Triwulan II-2021



sebesar 13,14 persen (*y-on-y*). Pada triwulan ini, semua komponen pembentuk PDRB mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi adalah Ekspor Luar Negeri sebesar 193,55 persen dan Impor Luar Negeri sebesar 57,05 persen. Pertumbuhan yang terjadi pada komponen Ekspor Luar Negeri disebabkan oleh kenaikan ekspor konsentrat bijih tambaga pada PT. Freeport.

Selama triwulan II-2021, komponen yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB adalah PK-RT sebesar 45,51 persen, diikuti PMTB sebesar 31,38 persen, Ekspor Luar Negeri 27,50 persen, PKP sebesar 19,73 persen, PK-LNPRT sebesar 16,24 persen. Impor Luar Negeri sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 2,33 persen.

Ekonomi Papua triwulan II-2021 terhadap triwulan I-2021 (*q-to-q*) mengalami pertumbuhan sebesar 2,06 persen. Semua komponen pada PDRB menurut pengeluaran mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan terbesar pada komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 71,38 persen dan Impor Luar Negeri sebesar 29,97 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan permintaan barang pada bulan ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 6,75 persen. Pertumbuhan komponen ini terjadi karena adanya pencairan THR bagi ASN. Komponen PMTB tumbuh sebesar 3,52 persen, PK-LNPRT tumbuh sebesar 2,73 persen, dan PKRT tumbuh sebesar 0,89 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi triwulan II-2021 (*q-to-q*), komponen yang memberikan sumbangan terbesar adalah Ekspor Luar Negeri sebesar 8,75 persen, diikuti PKP sebesar 1,16 persen, PMTB sebesar 1,00 persen, Impor Luar Negeri sebesar 0,62 persen, PKRT sebesar 0,37 persen, dan PK-LNPRT sebesar 0,05 persen.

Tabel 7. Laju Pertumbuhan (*q-to-q*) dan (*y-on-y*) serta Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan II-2021 Provinsi Papua

No	Kategori	Laju Pertumbuhan (<i>q-to-q</i>)	Laju Pertumbuhan (<i>y-on-y</i>)	Distribusi ADHB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,89	5,50	45,51
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,73	2,53	2,04
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,75	4,98	19,73
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,52	2,61	31,38
5	Ekspor Luar Negeri	71,38	193,55	27,50
6	Impor Luar Negeri	29,97	57,05	2,33

EKSPOR

“September 2021, total ekspor Papua mencapai US\$563,28 juta”

A. Ekspor Migas dan Non Migas

Ekspor Papua pada September 2021 tercatat senilai US\$563,28 juta atau meningkat sebesar 5,10 persen dibanding bulan sebelumnya yang senilai US\$535,94 juta. Dilihat dari jenisnya, ekspor Papua bulan ini hanya berupa ekspor nonmigas senilai US\$563,28 juta. Ekspor bulan ini terbesar berasal dari Pelabuhan Amamapare yaitu senilai US\$558,53 juta atau dengan kata lain 99,16 persen dari total ekspor Papua.

Secara kumulatif, total ekspor Papua pada Januari-September 2021 adalah senilai US\$3.092,28 juta atau meningkat 236,90 persen dibandingkan total ekspor Januari-September 2020 yang senilai US\$917,86 juta.

B. Ekspor Menurut Golongan Barang HS 2 Dijit

Ekspor golongan Bijih Tembaga & Konsentrat (HS26) pada September 2021 senilai US\$558,53 juta atau meningkat 5,86 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya senilai US\$527,63 juta. Ekspor golongan Bijih Tembaga & Konsentrat (HS26) berasal dari PT. Freeport Indonesia dan dimuat di pelabuhan Amamapare di Kabupaten Mimika. Ekspor golongan Kayu & Barang dari Kayu (HS44) senilai US\$4,75 juta. Tidak terdapat ekspor golongan Ikan & Hewan Air Lainnya (HS03) dan Non Migas Lainnya pada bulan ini.

Tabel 8. Ringkasan Perkembangan Ekspor Provinsi Papua Januari-September 2021

Uraian	Nilai FOB (Juta US\$)				% Perubahan Sep 2021* thd Sep 2021	% Perubahan Jan-Sep 2021* thd Jan-Sep 2020	% Peran thd Total Ekspor Jan-Sep 2021
	Agt 2021	Sep 2021*	Jan-Sep 2020	Jan-Sep 2021*			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Ekspor	535,94	563,28	917,86	3.092,28	5,10	236,90	100,00
Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-100,00	0,00
Non Migas	535,94	563,28	917,86	3.092,28	5,10	236,90	100,00

Ket:Tanda (*) menunjukkan Angka Sementara

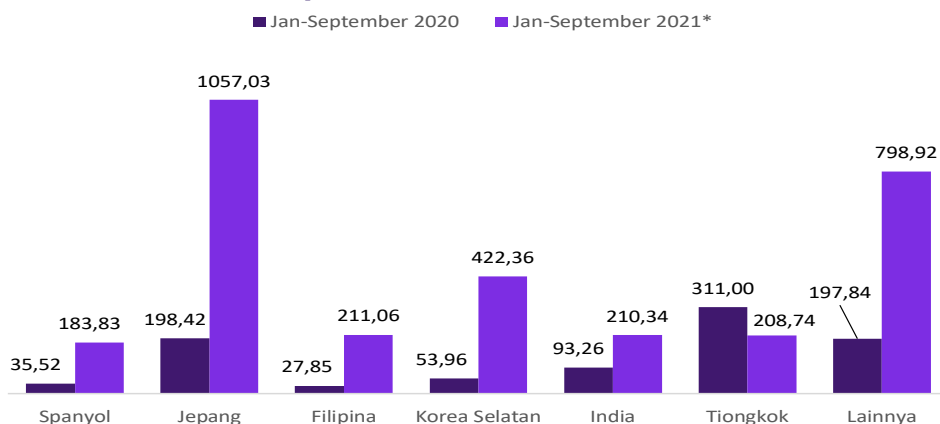
Nilai kumulatif Januari-September 2021 untuk ekspor golongan Biji Tembaga & Konsentrat (HS26) sebesar US\$3.009,23 juta. Nilai ini meningkat 252,50 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar US\$853,68 juta. Nilai kumulatif ekspor Golongan Kayu & Barang dari Kayu (HS44) meningkat sebesar 23,55 persen. Sementara itu, ekspor Golongan Ikan & Hewan Air Lainnya (HS03) tidak terdapat ekspor pada Januari-September 2021. Golongan Non Migas Lainnya mengalami peningkatan dari US\$14,21 juta pada Januari-September 2020 menjadi US\$16,84 juta pada Januari-September 2021.

C. Ekspor Menurut Negara Tujuan

Enam negara utama tujuan ekspor Papua adalah negara Spanyol, Jepang, Filipina, Korea Selatan, India dan Tiongkok. Ekspor keenam negara utama tersebut pada September 2021 tercatat senilai US\$369,70 juta. Ekspor ke negara lainnya pada September 2021 yang sebesar US\$193,57 juta. Negara lainnya yang menjadi tujuan ekspor yakni Taiwan dengan nilai ekspor senilai US\$112,92 juta, dimana komoditinya berupa Biji Tembaga & Konsentrat (HS26).

Secara kumulatif, ekspor Papua ke enam negara utama pada periode Januari-September 2021 mengalami peningkatan bila dibandingkan ekspor ke enam negara utama pada Januari-September 2020. Ekspor Papua ke negara lainnya juga mengalami peningkatan dari US\$197,84 juta pada Januari-September 2020 menjadi US\$798,92 juta pada Januari-September 2021. Ekspor ke enam negara utama memberikan andil 74,16 persen terhadap total ekspor Papua pada Januari-September 2021.

Gambar 15. Nilai Ekspor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan, Januari-September 2020/2021* (Juta US\$)



Ket:Tanda (*) menunjukkan Angka Sementara

IMPOR

“September 2021, Impor Papua senilai US\$23,61 juta”

A. Impor Migas dan Non Migas

Impor Papua pada September 2021 tercatat senilai US\$23,61 juta yang terdiri dari impor migas senilai US\$8,26 juta dan impor nonmigas senilai US\$15,35 juta. Dibandingkan Agustus 2021, nilai impor Papua pada September 2021 mengalami penurunan sebesar 61,03 persen yang dipengaruhi oleh menurunnya impor non migas sebesar 70,45 persen. Komoditi nonmigas yang memiliki nilai impor terbesar berasal dari golongan Mesin/peralatan listrik (HS785) yang memiliki nilai US\$37,69 juta atau sebesar 77,35 persen dari total nilai impor komoditi nonmigas. Sedangkan impor migas menurun 53,29 persen (turun US\$9,86 juta).

B. Impor Menurut Golongan Barang HS 2 Diji

Impor 10 golongan nonmigas utama terdiri dari Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (HS84), Plastik dan bawang dari plastik (HS39), Barang-barang dari besi dan baja (HS73), Kendaraan dan bagiannya (HS87), Mesin/peralatan listrik (HS85), Berbagai produk kimia (HS38), Karet dan barang dari karet (HS40), Perkakas (HS82), Alat optik, fotografi dan Alat kesehatan (HS90) dan Bahan kimia logam (HS28). Pada September 2021, impor tersebut tercatat senilai US\$11,95 juta atau menurun 75,48 persen bila dibandingkan Agustus 2021 yang sebesar US\$48,72 juta.

Golongan barang nonmigas utama dengan nilai impor terbesar adalah golongan Barang-barang dari besi dan baja (HS73) sebesar US\$4,85 juta, Mesin/peralatan listrik (HS85) sebesar US\$2,37 juta, Kendaraan dan bagiannya (HS87) sebesar US\$2,16 juta. Nilai impor golongan

Tabel 9. Ringkasan Perkembangan Impor Provinsi Papua Januari-September 2021

Uraian	Nilai CIF (Juta US\$)				% Perubahan Sep 2021* thd Agt 2021	% Perubahan Jan-Sep 2021* thdp Jan-Sep 2020	% Peran thd Total Impor Jan-Sep 2021*
	Agt 2021	Sep 2021*	Jan-Sep 2020	Jan-Sep 2021*			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Impor	60,58	23,61	141,58	262,10	-61,03	85,12	100,00
Migas	8,64	8,26	44,01	92,90	-4,44	111,10	35,45
Non Migas	51,94	15,35	97,57	169,20	-70,45	73,41	64,55

Ket:Tanda (*) menunjukkan Angka Sementara

nonmigas lainnya mengalami peningkatan sebesar 5,77 persen yaitu dari US\$3,21juta menjadi US\$3,40 juta. Impor golongan nonmigas lainnya yang terbesar berasal dari golongan Bahan peledak, korek api, dan kembang api (HS36) senilai US\$2,43 juta.

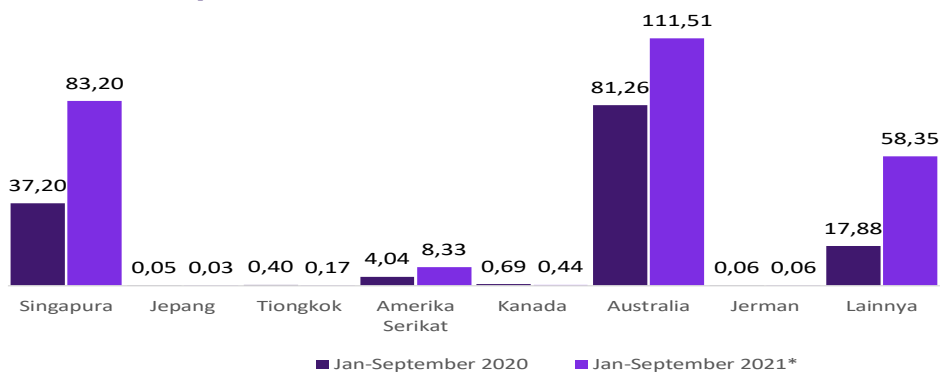
Secara kumulatif, total nilai impor 10 golongan nonmigas utama pada periode Januari-September 2021 dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 85,02 persen, yaitu dari US\$77,77 juta menjadi US\$143,88 juta. Berbanding lurus dengan total nilai impor kumulatif golongan nonmigas lainnya yang juga naik sebesar 27,82 persen atau lebih tinggi US\$5,51juta. Impor 10 golongan nonmigas utama memberikan andil 90,34 persen terhadap total impor kumulatif Januari-September 2021.

C. Impor Menurut Negara Asal

Nilai impor dari tujuh negara utama pada September 2021 tercatat sebesar US\$21,11 juta atau menurun 5,92 persen dibandingkan nilainya pada Agustus 2021 yang sebesar US\$22,44 juta. Tiga negara pemasok barang terbesar ke Papua pada September 2021 adalah Australia senilai US\$11,97 juta (50,72 persen), Singapura senilai US\$8,26 juta (34,98 persen) dan Filipina dengan impor senilai US\$2,27 juta (9,64 persen).

Total nilai impor kumulatif dari tujuh negara utama pada periode Januari-September 2021 adalah sebesar US\$203,75 juta atau lebih tinggi 64,72 persen bila dibandingkan dengan nilainya pada Januari-September 2020 yang sebesar US\$123,70 juta. Total nilai impor kumulatif dari negara lainnya pada periode Januari-September 2021 mengalami peningkatan sebesar 226,27 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu dari US\$17,88 juta menjadi US\$58,35 juta.

Gambar 16. Nilai Impor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan Januari-September 2020/2021*



Ket:Tanda (*) menunjukkan Angka Sementara

NILAI TUKAR PETANI

“September 2021, NTP Papua sebesar 102,04”

A. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP yang diperoleh dari perbandingan indeks harga diterima petani (It) terhadap indeks harga dibayar petani (Ib) (dalam persentase) merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan.

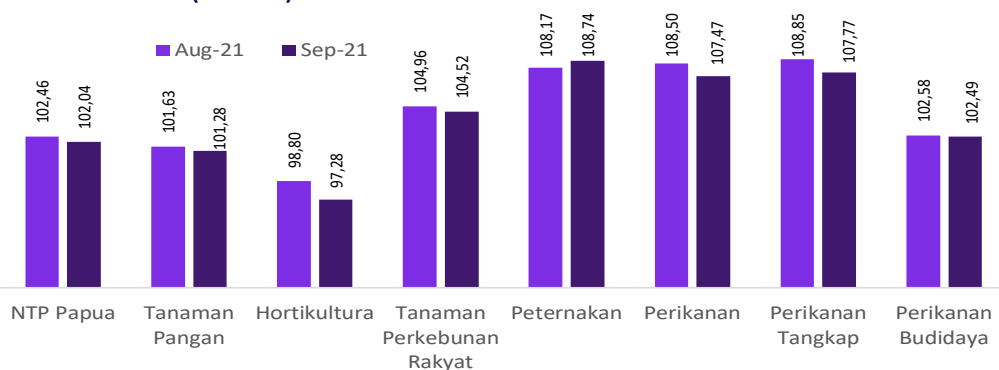
NTP menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif, semakin kuat pula tingkat kemampuan/ daya beli petani.

NTP Papua September 2021 tercatat turun 0,42 persen menjadi 102,04 dibandingkan NTP Agustus 2021.

Berdasarkan pemantauan harga pedesaan di beberapa daerah di Papua, perubahan indeks NTP disebabkan karena perubahan indeks harga yang diterima petani (It) lebih lambat daripada perubahan indeks harga yang dibayar petani (Ib).

Dilihat menurut subsektornya, perubahan angka indeks yang terjadi

Gambar 17. Perkembangan NTP Papua Menurut Subsektor Agustus-September 2021 (18=100)

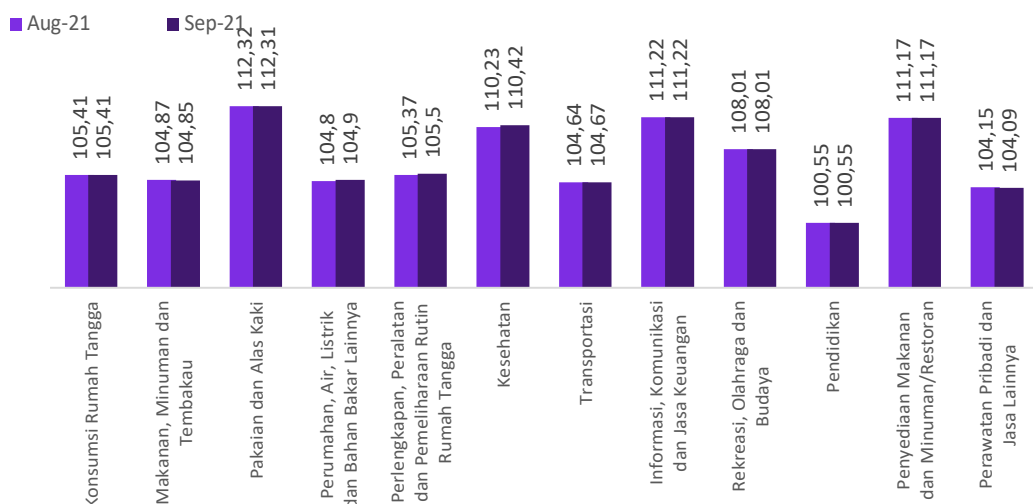


yaitu subsektor Tanaman Pangan turun 0,34 persen, Hortikultura turun 1,53 persen, Tanaman Perkebunan Rakyat turun 0,41 persen, Peternakan naik 0,52 persen, dan Perikanan turun 0,94 persen. Indeks harga diterima petani (It) menggambarkan perubahan harga komoditas yang dihasilkan petani. Pada September 2021, It Papua sebesar 107,04 atau turun 0,41 persen dibandingkan It September. Perubahan It terjadi karena perubahan indeks di beberapa subsektor yaitu subsektor Tanaman Pangan turun 0,33 persen, subsektor Hortikultura turun 1,52 persen, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat turun 0,50 persen, subsektor Perikanan turun 0,99 persen, sedangkan subsektor Peternakan naik 0,53 persen.

Fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat perdesaan, khususnya petani baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk keperluan produksi hasil pertanian dapat diketahui melalui indeks harga dibayar petani (Ib).

Pada September 2021, Ib Papua sebesar 104,90 atau naik 0,002 persen dibandingkan Ib bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 104,897. Perubahan IbgabungantersebutdidorongolehIbpadasubsektorTanaman Pangannaik0,01persen,subsektorHortikultura naik0,01persen,subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat turun 0,09 persen, subsektor Perikanan turun 0,05 persen, sedangkan subsektor Peternakan naik 0,01 persen.

Gambar 18. Perkembangan Indeks Konsumsi Rumah Tangga Menurut Subkelompok Pengeluaran Provinsi Papua, Agustus-September 2021 (2018=100)



B. Perkembangan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT)

Konsumsi Rumah Tangga Petani merupakan salah satu komponen nilai yang dibayar oleh petani. Pada September 2021, terjadi penurunan IKRT sebesar 0,00076 persen di wilayah perdesaan Papua yang dipicu oleh turunnya indeks harga pada kelompok pengeluaran rumah tangga.

Dari 34 provinsi diketahui 13 provinsi mengalami kenaikan IKRT, sedangkan 21 provinsi lainnya mengalami penurunan IKRT. Kenaikan IKRT tertinggi terjadi di Provinsi Bangka Belitung yaitu sebesar 0,71persen dan penurunan IKRT terendah terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 0,93 persen.

C. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Subsektor

NTUP Papua pada September 2021 adalah 104,31 atau turun sebesar 0,43 persen. Berdasarkan subsektor, tercatat subsektor Tanaman Pangan turun 0,35 persen, subsektor Hortikultura turun 1,53 persen, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat turun 0,51 persen, subsektor Peternakan naik 0,44 persen dan subsektor Perikanan turun 0,88 persen.

Tabel 10. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian menurut subsektor Provinsi Papua dan Persentase Perubahannya, Agustus - September 2021 (2018=100)

Subsektor (1)	Agustus 2021 (2)	September 2021 (3)	Perubahan (%) (4)
1. Tanaman Pangan	103,86	103,50	-0,35
2. Hortikultura	102,01	100,46	-1,53
3. Tanaman Perkebunan Rakyat	105,83	105,29	-0,51
4. Peternakan	110,81	111,30	0,44
5. Perikanan	110,67	109,70	-0,88
5.1 Perikanan Tangkap	111,01	109,99	-0,92
5.2 Perikanan Budidaya	105,04	104,88	-0,15
NTUP Gabungan	104,76	104,31	-0,43

ANGKUTAN LAUT

“Agustus 2021, penumpang berangkat (angkutan laut dalam negeri) sebanyak 545 orang”

A. Penumpang Berangkat dan Datang

Menurunnya kasus harian Covid-19 di Indonesia pada awal Agustus tidak serta-merta menghapus kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di sejumlah wilayah, namun dalam aplikasinya PPKM ini dibagi menjadi empat level. Kebijakan ini masih membatasi mobilitas masyarakat yang berdampak pada sektor transportasi di Indonesia termasuk Papua. Jumlah penumpang yang berangkat menggunakan angkutan laut dalam negeri pada Agustus 2021 tercatat sebanyak 545 orang atau turun 92,28 persen, dibanding Juli 2021 sebanyak 7.058 orang.

Penumpang datang dan berangkat dari Pelabuhan Jayapura masing-masing tercatat sebanyak 388 orang dan 425 orang. Sementara penumpang yang datang dari Pelabuhan Merauke tercatat sebanyak 120 orang dan tidak tercatat penumpang yang berangkat dikarenakan status pembatasan orang masuk ke Kabupaten Merauke.

Jumlah embarkasi kumulatif penumpang angkutan laut pada Januari-Agustus 2021 sebanyak 51.557 orang atau menurun 7,00 persen bila dibandingkan dengan Januari-Agustus tahun 2020. Sedangkan arus debarkasi penumpang mengalami peningkatan sebesar 8,93 persen dari

Tabel 11. Perkembangan Penumpang Berangkat dan Datang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Agustus 2021

Pelabuhan	Jumlah Penumpang Berangkat			Jumlah Penumpang Datang		
	Jul'21 (Orang)	Agus'21 (Orang)	% Perubahan Agus'21 thd Jul'21	Jul'21 (Orang)	Agus'21 (Orang)	% Perubahan Agus'21 thd Jul'21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jayapura	6.555	425	-93,52	7.036	388	-94,49
Merauke	503	120	-76,14	1.229	-	-100,00
Total	7.058	545	-92,28	8.265	388	-95,31

58.927 orang menjadi 64.192 orang.

B. Bongkar dan Muat Barang

Volume barang yang dimuat pada Agustus 2021 tercatat sebesar 20.107 ton atau menurun 10,63 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 22.499 ton.

Dilihat menurut pelabuhan, volume muat barang di Pelabuhan Jayapura, tercatat sebesar 11.234 ton atau menurun 2,95 persen. Sedangkan di Pelabuhan Merauke, volume muat barang tercatat sebesar 8.873 ton atau menurun 18,78 persen. Volume barang yang dimuat pada Januari-Agustus 2021 sebesar 147.443 ton meningkat 10,68 persen bila dibandingkan dengan Januari-Agustus 2020 sebesar 133.216 ton. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya volume barang yang dimuat di Pelabuhan Merauke sebesar 38,20 persen.

Volume barang yang dibongkar pada Agustus 2021 sebesar 124.306 ton. Di Pelabuhan Jayapura, volume bongkar barang pada Agustus 2021 tercatat sebesar 93.432 ton atau naik 7,96 persen dibandingkan Juli 2021 yang sebesar 86.543 ton. Di Pelabuhan Merauke, volume bongkar barang tercatat sebesar 30.874 ton atau naik 13,79 persen. Volume bongkar barang di Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke pada Januari-Agustus 2021 sebesar 855.041 ton atau meningkat 1,53 persen dibandingkan Januari-Agustus 2020 yang sebesar 842.143 ton.

Tabel 12. Perkembangan Bongkar dan Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Agustus 2021

Pelabuhan	Volume Bongkar Barang			Volume Muat Barang		
	Jul'21 (Ton)	Agus'21 (Ton)	% Perubahan Agus'21 thd Jul'21	Jul'21 (Ton)	Agus'21 (Ton)	% Perubahan Agus'21 thd Jul'21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jayapura	86.543	93.432	7,96	11.575	11.234	-2,95
Merauke	27.133	30.874	13,79	10.924	8.873	-18,78
Total	113.676	124.306	9,35	22.499	20.107	-10,63

ANGKUTAN UDARA

“Agustus 2021, penumpang berangkat (angkutan udara dalam negeri) sebanyak 36.014 orang”

A. Penumpang Berangkat dan Datang

Indonesia menetapkan tatanan hidup baru atau sistem *New Normal* sehubungan masih berlangsungnya pandemi COVID-19. Dilihat dari jumlah penumpang berangkat dan datang transportasi udara cukup bervariasi. Hal ini di karenakan transportasi udara di ijinakan beroperasi namun dengan beberapa pembatasan dan persyaratan seperti menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang menunjukkan hasil *swab PCR/antigen*, dan informasi calon penumpang. Jumlah penumpang yang berangkat menggunakan angkutan udara dalam negeri pada Agustus 2021 tercatat sebanyak 36.014 orang atau menurun 34,86 persen dibanding Juli 2021 sebanyak 55.283 orang. Jumlah penumpang yang datang pada Agustus 2021 sebanyak 43.866 orang atau menurun 27,97persen dibanding Juli 2021 sebanyak 60.898 orang.

Penumpang datang dan berangkat dari Bandara Sentani masing-masing tercatat sebanyak 27.133 orang dan 19.942 orang, di Bandara Mopah tercatat masing-masing 3.607 orang dan 3.390 orang. Sementara

Tabel 13. Perkembangan Penumpang Berangkat dan Datang Angkutan Udara Dalam Negeri Bandara Sentani, Mopah, dan Mozes Kilangin, Agustus 2021

Bandara	Jumlah Penumpang Berangkat			Jumlah Penumpang Datang		
	Jul'21 (Orang)	Agus'21 (Orang)	% Perubahan Agus'21 thd Jul'21	Jul'21 (Orang)	Agus'21 (Orang)	% Perubahan Agus'21 thd Jul'21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sentani	33.245	19.942	-40,02	38.417	27.133	-29,37
Mopah	5.436	3.390	-37,64	4.996	3.607	-27,80
Mozes Kilangin	16.602	12.682	-23,61	17.485	13.126	-24,93
Total	55.283	36.014	-34,86	60.898	43.866	-27,97

penumpang yang datang dan berangkat dari Bandara Mozes Kilangin tercatat masing-masing sebanyak 13.126 orang dan 12.682 orang. Jumlah embarkasi kumulatif penumpang angkutan udara pada Januari-Agustus 2021 sebanyak 620.293 orang atau meningkat 64,42 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020. Sedangkan arus debarkasi kumulatif penumpang Januari-Juli 2021 mengalami peningkatan sebesar 73,63 persen menjadi 628.898 orang.

B. Bongkar dan Muat Barang

Volume barang yang dimuat pada Agustus 2021 tercatat sebesar 10.758 ton atau meningkat 33,65 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 8.050 ton. Dilihat menurut bandara, volume muat barang di Bandara Sentani, tercatat sebesar 8.762 ton atau meningkat 36,84 persen dibandingkan Juli 2021 yang sebesar 6.403 ton. Sedangkan di Bandara Mopah, volume muat barang tercatat sebesar 115 ton atau menurun 16,30 persen. Di Bandara Mozes Kilangin, volume muat barang tercatat sebesar 1.881 ton atau meningkat 24,69 persen.

Volume barang yang dibongkar pada Agustus 2021 sebesar 1.434 ton atau meningkat 17,56 persen dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 1.220 ton. Di Bandara Sentani, volume bongkar barang pada Agustus 2021 tercatat sebesar 832 ton atau naik 16,93 persen dibandingkan Juli 2021 yang sebesar 711 ton. Di Bandara Mopah, volume bongkar barang tercatat sebesar 82 ton atau meningkat 30,43 persen. Di Bandara Mozes Kilangin, volume bongkar barang Agustus 2021 tercatat 521 ton atau naik 16,75 persen dibandingkan Juli 2021 yang sebesar 446 ton.

Tabel 14. Perkembangan Bongkar dan Muat Barang Angkutan Udara Dalam Negeri Bandara Sentani, Mopah, dan Mozes Kilangin, Agustus 2021

Bandara	Volume Bongkar Barang			Volume Muat Barang		
	Jul'21 (Ton)	Agus'21 (Ton)	% Perubahan Agus'21 thd Jul'21	Jul'21 (Ton)	Agus'21 (Ton)	% Perubahan Agus'21 thd Jul'21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sentani	711	832	16,93	6.403	8.762	36,84
Mopah	63	82	30,43	138	115	-16,30
Mozes Kilangin	446	521	16,75	1.509	1.881	24,69
Total	1.220	1.434	17,56	8.050	10.758	33,65

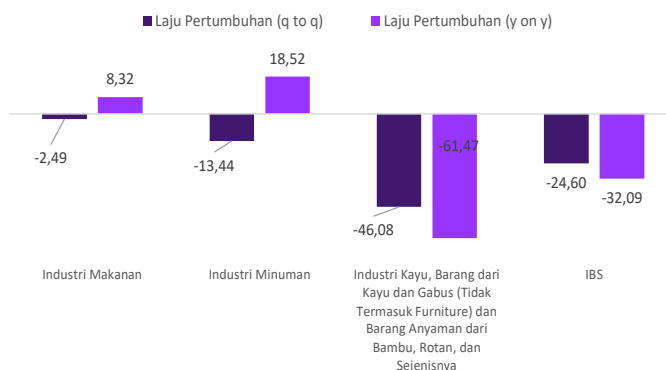
INDUSTRI MANUFAKTUR

“Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang di triwulan IV-2019 tumbuh negatif 24,60 persen”

A. Industri Manufaktur Besar Dan Sedang Triwulan IV-Tahun 2019

Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (q-to-q) pada Triwulan IV-2019 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 24,60 persen dari Triwulan III-2019. Angka pertumbuhan tersebut lebih rendah dari angka pertumbuhan secara nasional yang tumbuh positif sebesar 0,09 persen. Penurunan angka pertumbuhan ini disebabkan karena terjadi penurunan produksi pada Industri Kayu, Barang dari Kayu (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (KBLI 16). Produksi kayu mengalami penurunan drastis karena vakumnya salah satu perusahaan kayu dengan skala besar di Papua sehingga mempengaruhi jumlah kayu yang dihasilkan. Selain itu, terkait pembatasan izin untuk memperluas lahan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) juga belum menemukan titik terang hingga saat ini. Kondisi yang sama terjadi pada produksi Industri Minuman (KBLI 11). Hal ini merupakan efek lanjutan dari kerusuhan yang terjadi di Papua pada triwulan lalu. Selain itu banyak acara-acara akhir tahun yang tidak dilaksanakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, mengingat kondisi di beberapa tempat belum kondusif sepenuhnya, yang secara tidak langsung menyebabkan permintaan juga ikut menurun.

Gambar 19. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Menurut KBLI Provinsi Papua Triwulan IV-2019 (persen)



Catatan:

Dari beberapa jenis IBS yang ada di Papua, hanya Industri Makanan (KBLI 10) dan Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya (KBLI 16) saja yang dapat dipublikasikan. Hal ini disebabkan karena tidak semua jenis industri manufaktur besar dan sedang memenuhi syarat penghitungan pertumbuhan produksi industri, karena jumlah perusahaannya yang sangat sedikit.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan produksi Triwulan IV-2018 pertumbuhan Produksi IBS (y-on-y) Provinsi Papua selama Triwulan IV-2019 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 32,09 persen. Hal itu dikarenakan Industri Kayu, Barang dari Kayu (tidak termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (KBLI 16) mengalami penurunan secara (y-on-y) pada triwulan IV-2019.

B. Industri Manufaktur Mikro Dan Kecil (IMK) Triwulan IV-2019

Pertumbuhan produksi Industri Mikro dan Kecil di Papua pada Triwulan IV-2019 secara (q-to-q) tumbuh sebesar 1,36 persen dari Triwulan III-2019 dan berada di atas pertumbuhan nasional yang tumbuh negatif sebesar 0,24 persen.

Pertumbuhan positif tersebut dipengaruhi karena adanya perayaan Hari Raya Natal. Produksi barang galian bukan logam (KBLI 23), makanan (KBLI 10) dan minuman (KBLI 11) dengan share yang cukup besar mengalami pertumbuhan positif yaitu 3,68 persen, 0,94 persen dan 5,20 persen dari Triwulan III-2019. Secara y-o-y, produksi Industri Mikro dan Kecil di Papua pada Triwulan IV-2019 ini mengalami pertumbuhan positif 10,53 persen dibandingkan Triwulan IV-2018.

Tabel 15. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Menurut KBLI Provinsi Papua Triwulan IV-2019 (persen)

Kode KBLI	Jenis Industri	Pertumbuhan (%)	
		q to q	y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Industri Makanan	0,94	7,28
11	Industri Minuman	5,20	3,88
13	Industri Tekstil	2,06	-7,33
14	Industri Pakaian Jadi	14,42	1,47
15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	22,58	5,63
16	Industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-6,04	-5,74
18	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	13,25	-22,19
20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	-17,13	35,09
21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	-19,26	-32,98
23	Industri Barang Galian Bukan Logam	3,68	5,82
25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	1,50	4,94
30	Industri Alat Angkutan Lainnya	-55,40	25,98
31	Industri Furnitur	-1,37	-14,34
32	Industri Pengolahan Lainnya	61,21	33,34
33**	Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	-41,42	97,55

catatan:

** Angka hanya diwakili oleh satu sampel usaha/perusahaan dengan beberapa komoditi

POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

“Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) total di Provinsi Papua pada tahun 2019 untuk komoditas beras 22,23 persen; cabai merah 34,47 persen; bawang merah 30,09 persen; dan daging ayam ras 36,38 persen”

Survei pola distribusi perdagangan beberapa komoditas (Poldis) 2020 merupakan survei yang bertujuan untuk mendapatkan pola distribusi perdagangan dan margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) total produsen sampai dengan konsumen akhir pada suatu wilayah. Data yang dikumpulkan merupakan data tahun 2019, dengan responden produsen dan pedagang yang tersebar di 6 kabupaten/kota potensi komoditas terpilih di Provinsi Papua.

Komoditas strategis dalam survei Poldis dipilih berdasarkan kriteria komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, komoditas yang memiliki peran besar dalam pembentukan inflasi dan komoditas yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Komoditas yang terpilih adalah beras, cabai, bawang merah dan daging ayam ras.

Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) total di Provinsi Papua pada tahun 2019 untuk komoditas beras sebesar 22,23 persen; cabai merah 34,47 persen; bawang merah 30,09 persen; dan daging ayam ras 36,38 persen.

Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) total di nasional pada tahun 2019 sebesar 22,34 persen; cabai merah 61,31 persen; bawang merah 38,01 persen; dan daging ayam ras 25,53 persen.

Tabel 16. Tabel Pola Utama Distribusi Perdagangan di Papua Tahun 2019

Komoditas (1)	Pola Distribusi Perdagangan (2)
Beras	Produsen -> Distributor -> Pedagang Eceran -> Konsumen Akhir
Cabai Merah	Petani -> Pedagang Eceran -> Konsumen Akhir
Bawang Merah	Luar Provinsi -> Sub Distributor -> Pedagang Eceran -> Konsumen Akhir
Daging Ayam Ras	Luar Provinsi -> Distributor -> Pedagang Eceran -> Konsumen Akhir

PERTANIAN



TANAMAN PANGAN

“Luas panen padi sebesar 52.728 hektar dengan produksi sebesar 166.002 ton GKG (Angka Tetap)”

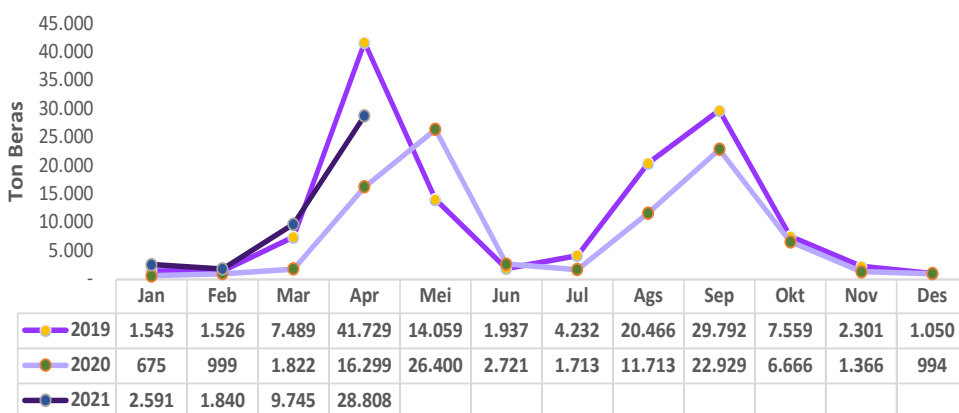
Penghitungan angka produksi Padi tahun 2020 dilakukan dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA). Dengan Metode tersebut dapat dihitung luas panen, dan potensi luas panen.

Berdasarkan hasil survei KSA, realisasi panen padi sepanjang Januari hingga Desember 2020 sebesar 52.728 hektar. Pada 2020, puncak panen terjadi pada bulan Mei, yaitu mencapai 15.471 hektar, sementara puncak panen pada 2019 terjadi pada bulan April, yaitu sebesar 14.887 hektar.

Produksi Padi Provinsi Papua dari Januari-Desember 2020 sebesar 166.002 ton gabah kering giling (GKG), atau mengalami penurunan sekitar 69.337 ton (29,46 persen) dibandingkan tahun 2019. Produksi tertinggi pada 2020 terjadi pada bulan Mei yaitu 46.476 ton dan yang terendah terjadi pada bulan Januari sebesar 1.188 ton.

Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi padi dari Januari-Desember 2020 setara dengan 94.297 ribu ton beras dan potensi produksi beras sepanjang Februari-April 2021 sebesar 40.393 ton beras.

Gambar 20. Produksi Beras Provinsi Papua Tahun 2019-2021* (Ton)



Keterangan: * Produksi beras Januari-April 2021 adalah angka sementara

<http://www.bps.go.id>

PENJELASAN TEKNIS



PENJELASAN TEKNIS

A. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

IKK merupakan indeks spasial yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan, dimana Kota Semarang sebagai kota acuan.

IKK Provinsi Papua pada tahun 2020 merupakan IKK tertinggi di Indonesia dengan nilai IKK sebesar 208,90. Sementara IKK tertinggi di Provinsi Papua adalah Kabupaten Puncak yaitu sebesar 492,62. Angka tersebut menggambarkan Kabupaten Puncak memiliki kondisi geografis yang paling sulit diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Papua, sedangkan IKK terendah adalah Kota Jayapura dengan nilai IKK sebesar 120,20.

B. Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen.

Mulai Februari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Ada beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK tahun dasar 2018=100 dibandingkan IHK 2012=100, khususnya dari sisi cakupan, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2018 yang dilaksanakan oleh BPS Kota IHK di seluruh Indonesia, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Hasil SBH 2018 mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang terjadi di Indonesia.

SBH 2018 dilaksanakan di 90 kota, yang terdiri dari 34 ibu kota provinsi dan 56 kabupaten/kota. Dari 90 kota tersebut, 3 diantaranya berada di Provinsi Papua yang meliputi: Merauke, Timika, dan Kota Jayapura. Survei ini dilaksanakan di daerah perkotaan dengan mencatat seluruh pengeluaran rumah tangga setiap bulannya.

Selain perubahan cakupan, IHK (2018=100) juga mengalami perubahan dari sisi pengelompokan komoditas. Pengelompokan komoditas didasarkan pada Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP) 2018 dari sebelumnya menggunakan COICOP 1999. Klasifikasi COICOP 2018 yang digunakan dimodifikasi dari 13 divisi COICOP menjadi 11 kelompok IHK. Secara nasional pengelompokan komoditas terdiri dari 11 kelompok dan 43 subkelompok.

Metode penghitungan IHK gabungan 3 kota di Papua pada 2018=100 menggunakan agregasi nilai konsumsi total seluruh kota. Adapun penghitungan rata-rata pada level komoditas menggunakan metode geometrik.

C. Nilai Tukar Petani (NTP)

Mulai Januari 2020, penghitungan NTP menggunakan indeks harga dengan tahun dasar baru yakni 2018=100 baik untuk It maupun Ib. Ada beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan indeks harga 2018=100 dibandingkan dengan indeks harga 2012=100, khususnya mengenai paket komoditas maupun diagram timbang pada masing-masing subsektor yakni Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan dan Perikanan. Pada Subsektor Perikanan, diagram timbang dibangun dari kegiatan Penangkapan Ikan maupun Kegiatan Budidaya Ikan.

Perubahan paket komoditas dan diagram timbang dalam penghitungan NTP dengan indeks harga 2018=100 didasarkan pada hasil Survei Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani 2017 (SPDT-NTP 2017) yang dilaksanakan oleh BPS. Hasil SPDT-NTP 2017 ini sekaligus mencerminkan adanya perubahan pola produksi, pola biaya produksi dan pola konsumsi rumah tangga petani dibandingkan dengan hasil SPDT-NTP periode sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun 2012. Secara nasional, penghitungan NTP dengan tahun dasar baru mencakup 34 provinsi sedangkan pada tahun dasar sebelumnya mencakup 33 provinsi.

Perubahan mendasar lainnya terjadi pada pengklasifikasian pengeluaran konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu komponen nilai yang dibayar oleh rumah tangga petani. Perkembangan harga konsumsi rumah tangga yang meliputi berbagai barang dan jasa dari waktu ke waktu tercermin melalui Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT). IKRT yang dihitung dengan tahun dasar baru 2018=100 menggunakan klasifikasi pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan modifikasi *Classification of Individual Consumption According to Purpose* 2018 (COICOP 2018). COICOP 2018 merupakan referensi

internasional untuk klasifikasi pengeluaran rumah tangga. Pengklasifikasian pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan COICOP 2018 terdiri dari 11 (sebelas) Kelompok Pengeluaran. Sementara itu, pada tahun dasar sebelumnya yakni 2012=100, pengklasifikasian rumah tangga didasarkan pada 7 (tujuh) Kelompok Pengeluaran berdasarkan modifikasi COICOP 1999.

D. Ketenagakerjaan

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik mengacu *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization* (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja.

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di pasar kerja, baik dengan bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Ukuran ini merupakan indikasi relatif dari pasokan tenaga kerja tersedia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase pengangguran terhadap angkatan kerja.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Indikator Makro Provinsi Papua Tahun 2017 - 2021

Jenis Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indikator Sosial					
Jumlah penduduk (jiwa)	3.265.444*	3.322.526*	3.379.302*	4.303.707**	-
IPM	59,09	60,06	60,84	60,44	-
1. AHH saat lahir (tahun)	65,14	65,36	65,65	65,79	-
2. Harapan lama sekolah (tahun)	10,54	10,83	11,05	11,08	-
3. Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,27	6,52	6,65	6,69	-
4. Pengeluaran perkapita disesuaikan (ribu Rp)	6.996	7.159	7.336	6.954	-
Angkatan kerja (jiwa)					
Februari	1.753.858	1.851.486	1.808.848	1.837.805	1.832.278
Agustus	1.762.841	1.835.963	1.857.300	1.767.403	-
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)					
Februari	77,30	79,38	76,04	75,01	73,47
Agustus	76,94	79,11	76,92	72,16	-
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)					
Februari	3,96	2,91	3,42	3,62	3,77
Agustus	3,62	3,20	3,51	4,28	-
Persentase penduduk miskin (persen)					
Maret	27,62	27,74	27,53	26,64	26,86
September	27,76	27,43	26,55	26,80	-
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)					
Maret	457.541	499.463	540.099	562.992	591.959
September	464.056	518.811	557.236	580.463	-
Distribusi pendapatan					
Maret					
40 % berpendapatan rendah	14,71	15,55	15,35	15,62	15,74
40 % berpendapatan sedang	41,13	41,03	40,10	39,73	38,43
20 % berpendapatan tinggi	44,16	43,42	44,55	44,66	45,82
September					
40 % berpendapatan rendah	15,18	14,77	15,74	15,72	-
40 % berpendapatan sedang	39,97	40,67	39,34	39,48	-
20 % berpendapatan tinggi	44,85	44,57	44,92	44,80	-
Gini Ratio					
Maret	0,397	0,384	0,394	0,392	0,397
September	0,398	0,398	0,391	0,395	-

Keterangan:

*Angka Hasil Proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010

*Angka Hasil Sensus Penduduk (SP) September 2020

Indikator Makro Provinsi Papua Tahun 2017 – 2021 (lanjutan)

Jenis Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Indikator Ekonomi						
Perkembangan Ekonomi	Ekspor-Impor					
	Ekspor (Juta US\$)	2.454,59	3.856,46	1.209,74	1.917,37	-
	Januari-Desember					
	Impor (Juta US\$)	446,51	521,87	355,33	199,46	-
	Januari-Desember					
	Neraca Perdagangan(Juta US\$)	2.008,08	3.334,5	854,40	1.717,91	-
	Januari-Desember					
	Inflasi					
	Inflasi Kota Jayapura	2,41	6,70	0,66	1,77	-
	Inflasi Kabupaten Merauke	1,25	5,42	0,86	3,36	-
	Inflasi Kabupaten Timika	-	-	-	1,13	-
	Pertumbuhan Ekonomi (persen)					
	Dengan Tambang (Persen)	4,64	7,32	-15,75	2,32	-
	Tanpa Tambang (Persen)	5,17	5,14	4,98	-3,51	-
	PDRB Berlaku					
	Dengan Tambang (miliar Rp)	188.938,08	210.600,57	189.505,27	198.905,28	-
Tanpa Tambang (miliar Rp)	122.457,68	133.440,14	144.863,52	142.683,47	-	
PDRB Harga Konstan						
Dengan Tambang (miliar Rp)	148.818,29	159.711,85	134.562,24	137.677,57	-	
Tanpa Tambang (miliar Rp)	86.644,23	91.100,68	95.637,19	92.282,49	-	

LAMPIRAN 2

Indikator Strategis Provinsi Papua Tahun 2021

Jenis Indikator	Satuan	2021											
		Jan'	Feb'	Mar'	Apr'	Mei	Jun'	Jul'	Agu'	Sep'	Okt'	Nov'	Des'
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perkembangan Ekonomi													
Ekonomi													
Ekspor	Juta US\$	232,22	133,29	252	314,42	337,23	387,99	335,90	535,94	563,28	-	-	-
Impor	Juta US\$	10,45	19,72	32,89	21,97	30,95	26,78	34,90	60,45	23,61	-	-	-
Neraca Perdagangan	Juta US\$	221,77	113,57	219,11	292,45	306,28	361,21	301,01	475,49	539,67	-	-	-
Inflasi													
Inflasi Gabungan	Persen	-0,27	0,53	2,29	-1,25	-3,52	-0,17	0,19	-0,42	-0,41	-	-	-
Inflasi Kota Jayapura	Persen	-0,42	0,72	4,01	-4,46	-3,96	-1,14	0,09	-0,42	-0,35	-	-	-
Inflasi Kabupaten Merauke	Persen	-0,09	0,46	3,13	0,33	-1,40	1,12	0,04	-0,99	-0,75	-	-	-
Inflasi Kabupaten Timika	Persen	-0,07	0,13	-0,87	3,40	3,82	0,70	0,52	-0,03	-0,30	-	-	-
Pertumbuhan Ekonomi			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV	
Dengan Tambang	Persen		14,27			13,14			-			-	
Tanpa Tambang	Persen		-3,77			2,81			-			-	
PDRB ADHB			Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV	
Dengan Tambang	Miliar Rp		54.314,58			56.183,34			-			-	
Tanpa Tambang	Miliar Rp		35.215,18			36.176,85			-			-	
Industri Manufaktur Besar dan Sedang	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri Manufaktur Mikro dan Kecil	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LAMPIRAN 3

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota se-Papua Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990, 2000, 2010 dan 2020

No.	Kabupaten/Kota	1990	2000	2010	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Merauke	243.722	318.350	195.716	230.932
2	Jayawijaya	355.562	417.326	196.085	269.553
3	Jayapura	246.467	167.227	111.943	166.171
4	Nabire	-	125.754	129.893	169.136
5	Kepulauan Yapen	70.333	81.593	82.951	112.676
6	Biak Numfor	90.843	111.092	126.798	134.650
7	Paniai	223.337	97.726	153.432	220.410
8	Puncak Jaya	-	79.356	101.148	224.527
9	Mimika	-	89.861	182.001	311.969
10	Boven Digoel	-	-	55.784	64.285
11	Mappi	-	-	81.658	108.295
12	Asmat	-	-	76.577	110.105
13	Yahukimo	-	-	164.512	350.880
14	Pegunungan Bintang	-	-	65.434	77.872
15	Tolikara	-	-	114.427	236.986
16	Sarmi	-	-	32.971	41.515
17	Keerom	-	-	48.536	61.623
18	Waropen	-	-	24.639	33.943
19	Supiori	-	-	15.874	22.547
20	Memberamo Raya	-	-	18.365	36.483
21	Nduga	-	-	79.053	106.533
22	Lanny Jaya	-	-	148.522	196.399
23	Mamberamo Tengah	-	-	39.537	50.685
24	Yalimo	-	-	50.763	101.973
25	Puncak	-	-	93.218	114.741
26	Dogiyai	-	-	84.230	116.206
27	Intan Jaya	-	-	40.490	135.043
28	Deiyai	-	-	62.119	99.091

LAMPIRAN 4

Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota se-Papua Tahun 2016-2020

No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Merauke	179,69	168,31	156,56	153,05	150,93
2	Jayawijaya	282,04	290,37	311,96	304,65	295,03
3	Jayapura	128,93	137,54	125,98	123,98	120,87
4	Nabire	152,00	147,53	150,45	148,12	138,70
5	Kepulauan Yapen	144,48	144,96	142,25	149,24	142,53
6	Biak Numfor	153,00	142,21	134,88	132,35	129,53
7	Paniai	215,29	225,31	250,29	241,21	229,51
8	Puncak Jaya	423,41	436,94	464,12	459,89	449,51
9	Mimika	156,16	148,00	150,54	133,19	125,93
10	Boven Digoel	181,24	171,29	161,96	162,63	159,84
11	Mappi	190,36	180,53	167,70	152,24	152,02
12	Asmat	220,75	231,32	213,94	202,28	179,68
13	Yahukimo	229,55	242,78	220,02	205,60	192,81
14	Pegunungan Bintang	379,97	391,44	368,02	364,25	356,01
15	Tolikara	351,04	351,23	377,27	360,48	336,37
16	Sarmi	200,31	188,91	163,77	145,09	138,83
17	Keerom	157,21	160,94	147,62	141,98	134,14
18	Waropen	154,47	163,01	186,5	171,32	143,14
19	Supiori	160,77	150,79	149,02	138,44	130,43
20	Memberamo Raya	182,07	192,76	208,29	193,19	184,27
21	Nduga	326,15	318,34	325,36	307,41	297,45
22	Lanny Jaya	325,43	332,92	337,65	333,55	317,27
23	Mamberamo Tengah	392,84	403,74	429,33	422,66	391,82
24	Yalimo	352,28	343,90	370,50	362,18	349,27
25	Puncak	454,67	469,96	498,98	493,31	492,62
26	Dogiyai	204,28	209,49	236,53	224,53	213,51
27	Intan Jaya	397,57	412,52	441,38	439,11	438,39
28	Deiyai	218,81	229,29	253,83	238,89	229,01
29	Kota Jayapura	150,07	147,06	132,86	121,49	120,20
	Provinsi Papua	239,98	229,82	227,90	218,59	208,90

LAMPIRAN 5

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se-Papua Tahun 2015-2020

No.	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Merauke	67,75	68,09	68,64	69,38	69,98	70,09
2	Jayawijaya	54,18	54,96	55,99	56,82	57,79	58,03
3	Jayapura	70,04	70,50	70,97	71,25	71,84	71,69
4	Nabire	66,49	66,64	67,11	67,70	68,53	68,83
5	Kepulauan Yapen	65,28	65,55	66,07	67,00	67,76	67,66
6	Biak Numfor	70,85	71,13	71,56	71,96	72,57	72,19
7	Paniai	54,20	54,34	54,91	55,83	56,58	56,31
8	Puncak Jaya	44,87	45,49	46,57	47,39	48,33	48,37
9	Mimika	70,89	71,64	72,42	73,15	74,13	74,19
10	Boven Digoel	59,02	59,35	60,14	60,83	61,51	61,53
11	Mappi	56,11	56,54	57,10	57,72	58,30	68,15
12	Asmat	46,62	47,31	48,49	49,37	50,37	50,55
13	Yahukimo	46,63	47,13	47,95	48,51	49,25	49,37
14	Pegunungan Bintang	40,91	41,90	43,24	44,22	45,21	45,44
15	Tolikara	46,38	47,11	47,89	48,85	49,68	49,50
16	Sarmi	60,99	61,27	62,31	63,00	63,45	63,63
17	Keerom	63,43	64,10	64,99	65,75	66,59	66,40
18	Waropen	62,35	63,10	64,08	64,80	65,34	64,94
19	Supiori	60,09	60,59	61,23	61,84	62,30	62,30
20	Memberamo Raya	48,29	49,00	50,25	51,24	52,20	51,78
21	Nduga	25,47	26,56	27,87	29,42	30,75	31,55
22	Lanny Jaya	44,18	45,16	46,49	47,34	48,00	47,86
23	Mamberamo Tengah	43,55	44,15	45,50	46,41	47,23	47,57
24	Yalimo	44,32	44,95	46,19	47,13	48,08	48,34
25	Puncak	39,41	39,96	41,06	41,81	42,70	43,04
26	Dogiyai	52,78	53,32	54,04	54,44	55,41	54,84
27	Intan Jaya	44,35	44,82	45,68	46,55	47,51	47,79
28	Deiyai	48,28	48,50	49,07	49,55	50,11	49,46
29	Kota Jayapura	78,05	78,56	79,23	79,58	80,16	79,94
	Provinsi Papua	57,25	58,05	59,09	60,06	60,84	60,44

LAMPIRAN 6

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Dengan Pertambahan dan Penggalian) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020 (Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018*	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Merauke	53.078.198,97	57.658.155,57	64.403.705,24	70.465.785,56	70.122.905,14
2	Jayawijaya	29.161.656,98	31.966.401,39	35.415.271,07	38.237.410,79	37.055.632,89
3	Jayapura	92.994.178,45	102.331.005,50	113.007.934,27	124.389.430,49	116.597.939,01
4	Nabire	60.346.153,97	65.361.352,34	69.908.072,16	73.743.380,60	73.282.592,19
5	Kepulauan Yapen	35.946.633,63	38.005.195,82	40.114.737,62	41.999.970,51	40.254.994,63
6	Biak Numfor	35.627.422,40	34.499.144,50	34.930.879,39	35.997.188,57	33.645.475,38
7	Paniai	19.599.038,08	20.741.036,90	22.462.852,42	23.571.368,84	23.746.723,79
8	Puncak Jaya	9.384.126,04	9.766.576,66	10.316.102,78	10.863.248,58	10.387.832,77
9	Mimika	315.981.759,90	352.769.406,16	395.993.721,40	249.600.755,06	283.522.446,62
10	Boven Digoel	60.582.064,59	64.411.696,37	67.435.795,70	70.435.498,90	67.421.167,24
11	Mappi	23.205.239,84	25.654.125,49	26.852.997,93	28.634.153,45	27.429.162,86
12	Asmat	20.286.651,41	21.938.123,87	23.626.517,20	25.344.489,01	26.009.527,50
13	Yahukimo	10.015.819,06	10.956.991,82	11.803.069,86	12.687.628,59	13.011.014,56
14	Pegunungan Bintang	20.274.951,77	22.051.088,02	23.700.771,49	25.249.498,62	25.704.338,43
15	Tolikara	9.223.135,51	9.861.303,81	10.627.506,78	11.452.375,34	11.916.373,96
16	Sarmi	54.872.042,05	59.990.021,67	64.315.850,93	69.596.245,41	71.300.058,05
17	Keerom	43.158.726,32	46.182.136,00	48.422.111,60	50.013.478,92	50.550.001,66
18	Waropen	55.600.644,53	59.792.941,40	62.601.875,94	65.138.441,48	63.772.030,72
19	Supiori	44.922.394,76	46.754.638,83	47.294.857,83	48.728.431,15	49.180.943,59
20	Memberamo Raya	54.489.881,63	59.778.066,95	63.708.877,65	68.361.142,03	69.635.961,56
21	Nduga	9.474.740,84	10.504.868,68	11.469.337,55	12.339.059,42	12.735.382,36
22	Lanny Jaya	7.912.642,87	8.661.891,10	9.435.175,66	10.217.416,98	10.733.832,84
23	Mamberamo Tengah	19.265.806,98	20.823.205,72	22.468.981,84	24.141.666,17	24.889.864,46
24	Yalimo	15.317.323,67	16.559.570,23	18.254.273,14	19.510.165,18	20.156.440,10
25	Puncak	9.756.558,61	10.667.499,68	11.569.147,43	12.374.228,54	12.469.769,25
26	Dogiyai	10.680.684,94	11.566.519,52	12.503.498,16	13.413.738,95	13.654.996,15
27	Intan Jaya	21.579.591,89	22.489.277,23	24.251.939,80	25.331.360,09	25.172.926,22
28	Deiyai	15.053.256,09	16.028.574,07	17.484.748,86	18.977.539,66	19.301.685,75
29	Kota Jayapura	90.135.176,33	95.737.108,34	102.166.321,11	107.838.040,54	106.026.392,23

* angka sementara

** angka sangat sementara



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA**

Jl. Dr. Sam Ratulangi Dok II Jayapura 99112

Telp. (0967) 5165 999, 5165 107

Email: bps9400@bps.go.id



9 772477 447008